



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 7**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 31  
TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2024**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2024**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 31 TAHUN  
2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dampak reformasi Birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan Nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, setiap Daerah harus menyusun Road Map Reformasi Birokrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2024.

Pasal 4

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB IV SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

BAB VI PENUTUP

(2) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam rencana aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020.

(3) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KAMPAR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN  
2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi di Indonesia merupakan agenda utama yang menjadi pusat perhatian dalam menyukseskan *Good Governance*. Berhasilnya Reformasi Birokrasi akan berdampak langsung dengan pelayanan publik prima bagi masyarakat. Orientasi utama dalam Reformasi Birokrasi adalah Kinerja dan Pelayanan Publik, untuk itu Layanan Prima merupakan target utama yang wajib terpenuhi dalam sebuah Reformasi Birokrasi yang meliputi Kolaboratif, Inovatif dan Sinergi antara instansi dan visi presiden. Merujuk kepada lima prioritas kerja Presiden Republik Indonesia 2019 – 2024 dalam urusan Reformasi Birokrasi yaitu kecepatan melayani dan memberi izin; menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak dalam pola birokrasi lama; dan adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif.

Saat ini diperlukan aksi dengan pola konstruktif untuk mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sesungguhnya. Kinerja yang berbasis *outcomes* yang harus diberikan untuk memenuhi *output* kinerja. Untuk itu diperlukan lima hal dalam mendukung untuk mewujudkan hal tersebut yaitu:

1. Perbaikan tata kelola kelembagaan
2. Transformasi digital
3. Deregulasi kebijakan
4. Peningkatan profesional Sumber Daya Manusia
5. Efektivitas pengawasan internal

Dari lima hal tersebut harapannya dapat mencapai tujuan dalam Reformasi Birokrasi yaitu Pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang efektif dan efisien serta pemerintah dengan pelayanan publik yang berkualitas. Maka karakteristik dari paradigma lama yaitu pemerintahan yang tidak melakukan perubahan, dengan tampilan statis sudah tidak akan memperlambat tujuan Reformasi Birokrasi nasional.

Reformasi Birokrasi disusun sesuai dengan rencana strategis merupakan bagian dari Tata Kelola Pemerintahan. Tata Kelola Pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang juga didukung dengan RPJMD, sehingga membentuk pola kerja yaitu manajemen talenta dan pelaksanaan sistem merit, yang telah menyesuaikan kebutuhan dan karakter lokal. Penyesuaian kebutuhan ini merupakan sebuah strategi dalam mempercepat Reformasi Birokrasi pada sektor pilihan, sehingga mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi nasional.

Saat ini sudah masuk periode yang ketiga dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024 yang merupakan periode terakhir dari *Grand Design*. Hasil akhir yang diharapkan adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), budaya birokrasi pemerintah yang professional, berintegritas tinggi, pelayan masyarakat dan abdi negara. Dimaknai dengan Tata Kelola Pemerintah di Indonesia baik Pusat maupun Daerah sudah siap dengan kinerja yang baik dan pelayanan kepada publik yang baik karena sudah beradaptasi dalam setiap tahapan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi,

Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, agenda ini menunjukkan bahwa Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Berikut *grand design* reformasi birokrasi dibagi dalam tiga periode yaitu metamorfosis periode Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Gambar 1.1. Metamorfosis Periode Reformasi Birokrasi Indonesia 2010 – 2024



Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk periode ketiga (2020-2024) atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (2010-2025). Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

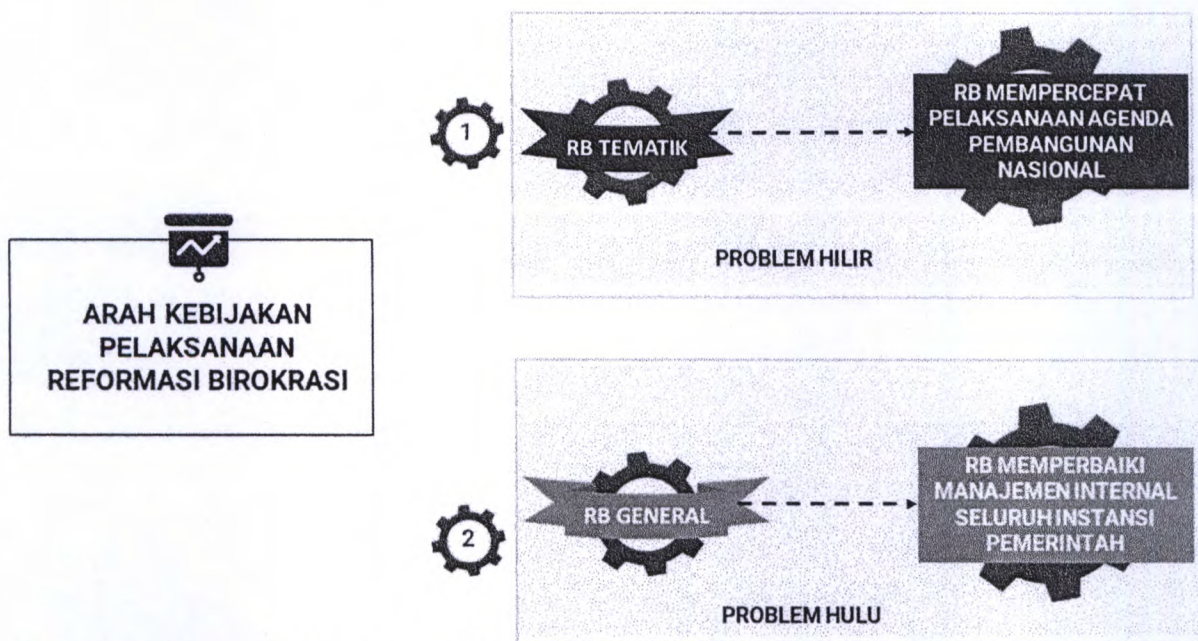
*Grand Design* yang telah terbentuk telah membentuk pola birokrasi nya sendiri, yang dimulai dengan pada periode pertama yaitu *Old Public Administration*, sama hal nya yang telah dibahas dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar pada masa itu dengan target pemerintahan yang bersih bebas KKN, Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik yang baik. *New Public Management* terefleksi pada periode kedua, pemenuhan dari implementasi yang telah disiapkan pada periode pertama sehingga akan fokus kepada komponen yang strategis. Saat ini sedang berada dimasa periode ketiga membentuk *governance* atau tata kelola, melakukan peningkatan besar-besaran pada K/L dan juga Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota sehingga mampu menyongsong visi utama yaitu *World Class Bureaucracy*.

Hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB 2020-2024 adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Upaya menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

*Double track*, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Gambaran dua fokus Reformasi Birokrasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. *Double Track* Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional



Sumber: Kementerian PANRB, 2023

Gambar 1.2, disebut dengan RB Tematik, sementara untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi Pemerintah disebut dengan RB *General*. Selanjutnya Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman.

Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan upaya sinkronisasi untuk mendukung suksesnya agenda Reformasi Birokrasi. Dengan hal tersebut maka kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar searah dengan pembangunan Reformasi Birokrasi Nasional dan dapat dirasakan dampaknya untuk pelayanan kepada masyarakat. Hasil Penilaian dari Kemenpan RB untuk Kabupaten Kampar pada tahun 2021 dalam penilaian tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) dengan nilai 62,30 atau predikat B.

Hasil penilaian tersebut menjadi evaluasi internal bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk lebih meningkatkan capaian kinerja, melalui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan catatan yang diberikan. Adapun upaya perbaikan dilakukan Tahun 2022 adalah :

1. Menetapkan agen perubahan dan meningkatkan internalisasi pembangunan
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan roadmap RB tahun 2020-2022
3. Menyusun peta proses bisnis Kabupaten dan peta proses bisnis OPD
4. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi e-skm

Upaya tersebut menjadi langkah dari Pemerintah Kabupaten Kampar untuk lebih siap dalam meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Melakukan sinkronisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan OPD dengan penajaman yang sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar

## 1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233).

### 1.3. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka sistematika penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

#### Bab II. Gambaran Birokrasi Instansi Pemerintah

- 2.1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar
- 2.2. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar

#### Bab III. Agenda Reformasi Birokrasi

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar
- 3.2. Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Kampar
- 3.3. Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Kampar

#### Bab IV. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- 4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

#### Bab V. Penutup

**BAB II**  
**GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH**

**2.1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar secara berkala telah mengalami perjalanan dimulai dari 2015-2019 dan secara terus menerus berproses untuk pelaksanaan agenda RB pada Tahun 2020-2024. Secara umum upaya peningkatan yang dilakukan dalam pelaksanaan RB di Kabupaten Kampar, nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar sejak tahun 2020-2022 sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2.1. Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar Tahun 2020-2022

NO	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	TARGET RPJMD	CAPAIAN	PERSENTASE
1	2020	69.31	52,43	75,7%
2	2021	69.52	55,37	79,7%
3	2022	70	57,52	82,2%

Sumber : Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat terlihat adanya peningkatan bobot skor. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar tahun 2020-2022 mengalami peningkatan secara periodik. Sesuai dengan Permenpan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar termasuk kategori CC, dengan interpretasi bahwa penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi juga upaya peningkatan kualitas dari sumber daya manusia (ASN).

Tabel 2.2. Nilai PMPRB Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2022

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI PMPRB		
		2020	2021	2022
1	DINAS KESEHATAN	29,88	32,78	35,99
2	DINAS KOMINFO	32,32	34,75	36,23
3	INSPEKTORAT	32,66	33,86	33,84
4	DISDIKPORA	32,43	32,04	29,03
5	BPKAD	33,92	34,81	35,31
6	BAPPEDA	27,74	27,92	23,92

7	SETDA	24,9	27,64	29,16
8	BKPSDM	24,57	26,46	26,57
9	DISDUKCAPIL	23,34	27,83	26,15
10	RSUD	24,57	31,52	31,79
11	BPBD		27,4	
12	DINAS PERHUBUNGAN		26,77	
13	DINAS PERPUSTAKAAN		25,14	
14	DINAS PERTANIAN TPH		25,14	
15	DINAS PERKEBUNAN		25,03	
16	DINAS SOSIAL		24,91	
17	BAPENDA		24,04	
18	DINAS PERIKANAN		22,63	
19	DINAS KETAHANAN PANGAN		22,48	
20	DINAS PUPR		18,74	
21	DISPERDAGKOP		18,61	
22	SEKRETARIAT DPRD		18,01	
23	BADAN KESBANGPOL		16,73	
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		16,68	
25	DINAS PMD		15,9	
26	DINAS PERINDUSTRIAN TK		15,37	
27	DINAS PARIWISATA		14,11	
28	SATPOL PP		13,9	
29	DPPKBP3A		13,81	
30	DINAS PERKIM		10,31	

Sumber : Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat terlihat adanya peningkatan pada PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) pada sebagian besar OPD yang telah melakukan penilaian selama 3 tahun. PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. PMPRB sendiri mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (*Enablers*) dan Hasil (*Results*). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau berdasarkan 8 area perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar berdasarkan komponen penilaian Tahun 2020-2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2020	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit (60)				
I.	Pemenuhan	20.00	9,20	9,39	9,41
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10.00	6,31	4,95	5,77
III.	Reform	30.00	11,82	11,42	11,56
	Total Komponen Pengungkit	60.00	27,33	25,76	26,74
B.	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10.00	7.27	6,78	7,36
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	6,10	8,31	8,91
3.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	6,10	8.16	7,99
4.	Kinerja Organisasi	10.00	5,63	6,36	6,52
	Total Komponen Hasil	40.00	25,10	29,61	30,78
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100.0 0	52,43	55,37	57,52

Sumber : Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat terlihat dalam beberapa komponen komponen yang mengalami peningkatan dan penurunan, namun hasil secara keseluruhan pertahun terdapat hasil antara area perubahan dan reform mengalami peningkatan. Namun pada komponen hasil, terdapat penurunan pada komponen Hasil antara Area Perubahan, Reform, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan mengalami peningkatan dan komponen lain nya mengalami peningkatan.

Selanjutnya memperhatikan Lembar Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar Tahun 2022 dari KemenPAN RB bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar sudah berupaya untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan dengan meningkatnya hasil antara dan reform serta total nilai. Selanjutnya beberapa hal permasalahan yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di Kabupaten Kampar agar terus berupaya untuk mencapai nilai/predikat B dengan target minimal >60 . Ada beberapa hal yang menurut hasil evaluasi Menpan-RB harus dioptimalkan di antaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan reformasi birokrasi dipemerintah daerah dan perangkat daerah belum berontasi pada reform tetapi masih dinilai Menpan hanya sebatas pelaksanaan kegiatan
2. Belum emiliki peta keterkaitan dan hasil identifikasi kebijakan yang memetakan aturan yang masih disharmonisasi
3. SOP belum disesuaikan dengan probis.
4. Belum optimal manajemen SDM terkait Standar kompetensi jabatan, assesment pegawai yang belum terpenuhi ukuran kinerja individu belum mengacu pada kinerja organisasi, dan belum sepenuhnya menerapkan merit sistem dan manajemen talenta.
5. Perjenjangan kinerja belum menggambarkan Logical framework
6. Belum ada monitoring pada implementasi benturan kepentingan, whistle blowing system, pengaduan masyarakat dan gratifikasi
7. Belum ada kebijakan reward dan punishment.
8. Belum maksimal dalam tindak lanjut dari hasil survei kepuasan masyarakat.

Terdapat 9 hasil antara Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. 4. Hasil Antara Pemerintah Kabupaten Kampar yang Dilakukan Pengukuran oleh Instansi *Leading Sector*

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	46,00	86,50	KASN
2	ASN yang Profesional	0-100	59,05	54,48	BKN
3	Implememtasi SPBE	0-5	1,67	2,22	Kementerian PAN RB

4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	30,44	51,20	LKPP
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,49	3,54	Kementerian PAN RB
6	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
7	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
8	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	99,7	82,07	Ombudsman Republik Indonesia
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	30,04	60,65	ANRI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hampir seluruh kualitas hasil antara pada Pemerintah Kabupaten Kampar di tahun 2022 mengalami peningkatan. Meskipun begitu, kualitas hasil antara masih perlu untuk terus ditingkatkan karena beberapa masih berada pada kategori penilaian yang belum baik. Hal tersebut yang dimaksud adalah Sistem Merit dengan kategori “Buruk”, Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori “Sangat Rendah”, dan Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan kategori “Cukup”.

Pemerintah Kabupaten Kampar telah menindaklanjuti rekomendasi resmi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2021, antara lain menetapkan agen perubahan dan meningkatkan internalisasi pembangunan reformasi birokrasi yang lebih efektif ke tingkat unit kerja/perangkat daerah, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan *Roadmap* RB 2020-2024 dan menyusun rencana aksi pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah sebagai acuan dalam membangun reformasi birokrasi, menyusun peta proses bisnis baru yang diikuti oleh setiap perangkat daerah, serta melakukan survei kepuasan masyarakat pada perangkat daerah menggunakan aplikasi E-SKM.

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kampar memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Komponen Hasil Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0 - 100	62,63	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0 - 100	89,10	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0 - 100	79,94	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0 - 100	76,26	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

## 2.2 Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar

Berdasarkan rekomendasi dari LHE PMPRB 2022 terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan:

1. Meningkatkan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi dipemerintah daerah dan perangkat daerah
2. Melaksanakan identifikasi kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis secara berkala.
3. Menyesuaikan SOP dengan probis.
4. Menyusun Standar kompetensi jabatan, assesment pegawai,
5. Mempercepat pelaksanaan merit sistem dan manajemen talenta.
6. Menyusun perjenjangan kinerja menggambarkan Logical framework
7. Melakukan monitoring pada implementasi benturan kepentingan, whistle blowing system, pengaduan masyarakat dan gratifikasi.
8. Mengimplementasikan kebijakan reward dan punishment.

9. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut dari hasil survei kepuasan masyarakat.

Dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi di Kabupaten Kampar pada tahun 2020-2022 telah banyak perubahan yang dilaksanakan terutama terkait RB General. Seluruh upaya yang dilakukan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi secara nasional. Selanjutnya hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan 8 area pd rb general di Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manajemen perubahan

Kabupaten Kampar telah melakukan manajemen perubahan dengan membuat *Road Map* Reformasi Birokrasi periode sebelumnya yaitu 2020-2024. Namun dalam perkembangannya hingga tahun 2022 sudah ada beberapa OPD yang memiliki Tim Reformasi Birokrasi ditingkat unit kerja seperti :

- a. Inspektorat melalui SK nomor 700/insp/30 , tanggal 15 Januari 2020
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui SK Kepala BAPPEDA Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi Bappeda Kabupaten Kampar
- c. Dinas Kesehatan melalui SK nomor 440/dinkes/SET-3/2019
- d. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kampar melalui SK direktur nomor 445/rsud/III-I/2020/1882 tanggal 18 Juni 2020
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui SK nomor 470/DKPS-SET/07
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui SK nomor 900/BPKAD-Set/2019/08
- g. Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui SK nomor 800/BKPSDM-SET/188

Selanjutnya ditemukan juga bahwa implementasi reformasi birokrasi belum dilakukan secara terintegrasi pada seluruh unit kerja, melainkan masih fokus pada pelaksanaan kegiatan di setiap kelompok Kerja (Pokja) Tim Reformasi Birokrasi dan tim reformasi birokrasi yang sudah dibentuk di beberapa unit kerja belum optimal.. Selain itu , agen perubahan yang ditetapkan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

## 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Selama ini , hal-hal terkait peraturan perundangan daerah di Kabupaten Kampar berada dalam koordinasi Bagian Hukum, kedepannya perlu harmonisasi dan evaluasi juga dilakukan ditingkat OPD.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar diantaranya yaitu :

- a. Melakukan Harmonisasi peraturan perundangan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupagten Kampar
- b. Menginformasikan produk hukum Kabupaten Kampar secara luas melalui <https://jdih.kamparkab.go.id/>

## 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Kabupaten Kampar telah menyesuaikan kelembagaan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah yang telah dibuat didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) bagian, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Selain itu , Pemerintah Kabupaten Kampar telah menerapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

## 4. Penataan Tatalaksana

Kabupaten Kampar telah melaksanakan beberapa upaya/kegiatan dalam area tatalaksana diantaranya:

- a. SOP telah dibuat oleh sebagian besar OPD
- b. Dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan 2020, Kabupaten Kampar berhasil naik dari zona kuning dengan nilai 1,86 menjadi zona hijau dengan nilai 2,93

## 5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen SDM , Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan beberapa hal diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas ASN melalui beasiswa pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Peningkatan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil
- b. Seleksi dan Penerimaan CPNS dengan menggunakan CAT
- c. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
- d. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
- e. Pembangunan/ Pengembangan Pusat Penyebarluasan Informasi dan Data
- f. Pemetaan Jabatan Fungsional
- g. Bezzeting PNS

#### 6. Penguatan Akuntabilitas

Untuk memaksimalkan penilaian perlu dilakukan kontribusi nyata berupa komitmen seluruh stakeholder dalam pelaksanaan akuntabilitas sehingga menghasilkan hasil yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini nilai SAKIP Kabupaten Kampar sudah mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten memperoleh nilai B terhadap Hasil Evakuasi SAKIP 2019 meningkat dari nilai CC pada tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN RB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kampar. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,23 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 6. Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  
Kabupaten Kampar Tahun 2022

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,95
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,55
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,53
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,20
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,23
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pmda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2022 sebagai berikut:

#### 1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan penajaman dan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran, dan indikator pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022 menjadi lebih berorientasi *outcome*. Penyempurnaan tersebut menghasilkan rumusan yang lebih terfokus dari yang sebelumnya memiliki 28 tujuan, 87 sasaran, 252 indikator sasaran, menjadi 10 tujuan, 18 sasaran, dan 33 indikator sasaran.

Selain itu, Kabupaten Kampar telah melakukan reviu dokumen perencanaan secara menyeluruh terhadap rancangan RPD dan Renstra pada tingkat Perangkat Daerah. Perbaikan dokumen ini berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Belum memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
- b. Sebagian besar Perangkat Daerah belum memiliki kualitas dokumen perencanaan yang baik, yang ditandai dengan sasaran strategis dan indikator yang belum berorientasi hasil/outcome. Contohnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terkait indikator “Prosentase (%) jumlah data sektoral yang dimuktahirkan setiap satu tahun” pada sasaran “Mewujudkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kabupaten Kampar”;
- c. Masih ditemukan indikator yang belum memiliki formulasi perhitungan untuk menjelaskan cara mengukur keberhasilan indikator tersebut yang salah satunya indikator “Persentase peningkatan destinasi wisata” yang dimiliki pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/measL/raö/e, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada indikator “Persentase masyarakat yang mendapatkan akses pasar murah” yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam mendukung sasaran “Tewujudnya kestabilan harga bahan pokok masyarakat”;
- e. Penjenjangan/cascading kinerja belum mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga penjenjangan kinerja tersebut belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

## 2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kampar dan perangkat daerahnya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan telah memiliki rencana aksinya untuk pencapaian kinerja.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengembangkan Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Kampar yang mengintegrasikan antara perencanaan, penganggaran, dan pemantauan capaian kinerja hingga ke level Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Belum memiliki pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan di level Pemda maupun Perangkat Daerah;
- b. Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas. Hal tersebut terlihat pada Program Pengelola Informasi Pasar Kerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- c. Belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja, sehingga tidak dapat dipastikan strategi yang digunakan relevan dalam mendukung ketercapaian kinerja.

### 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat Pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah dilaporkan secara tepat waktu walaupun analisis yang disajikan belum cukup mendalam.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai. Hal tersebut terlihat pada laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum sepenuhnya menjelaskan faktor keberhasilan atau hambatan dalam mencapai sasaran strategis beserta tren capaian kinerja dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Belum selarasnya sasaran, indikator dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja sehingga capaian kinerja tidak tergambarkan dengan baik seperti contoh pada Dinas Sosial;
- c. Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2022 untuk indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)"

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Hasil penilaian evaluasi internal tersebut menunjukkan sekitar 24 Perangkat Daerah telah mendapatkan predikat BB dan 8 Perangkat Daerah dengan predikat B.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum memiliki pedoman evaluasi untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
- b. Sebagian besar perangkat daerah belum menindaklanjuti hasil evaluasinya;
- c. Laporan hasil evaluasi yang dilakukan belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah;
- d. Belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi SAKIP yang mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah;
- e. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan *outcome* pada level Pemerintah Daerah.

#### 7. Penguatan Pengawasan

Pengawasan telah dilaksanakan tetapi perlu diperhatikan tindak lanjut (penguatan pengawasan) hasil monitoring dan evaluasi untuk peningkatan pelaksanaan ke depannya. Agenda pembangunan zona integritas untuk unit kerja percontohan telah dilaksanakan, tetapi pemahaman terhadap makna dan tujuan penerapan ZI belum dipahami secara merata oleh para pegawai yang terlibat sehingga sampai saat ini belum ada unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

Disisi lain, beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar diantaranya adalah :

- a. Pengawasan harta kekayaan ASN melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Penyampaian Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
- b. BPK RI telah memberikan opini WTP sebanyak 4 (empat) kali kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dari tahun 2016-2019.
- c. Telah terlaksana pendampingan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance & Consuling ;
- d. Seluruh Pejabat Eselon II di semua OPD diwajibkan menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam pelaksanaan tugas;

#### 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Beberapa temuan oleh evaluator adalah masih rendahnya kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal sedangkan hasil survey internal dan eksternal masih perlu dapat perhatian khusus. Untuk memaksimalkan penilaian perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh pegawai yang ada di Dinas/Badan terkait pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat dipahami oleh seluruh pegawai dalam penerapan ZI. Sampai saat ini ini belum ada Dinas/Badan yang memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Selanjutnya perlu juga mengaplikasikan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Kondisi implemementasi terhadap Undang-undang tersebut perlu mendapat perhatian dalam komponen pelayanan publik khususnya standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan pengaduan. Pemerintah Kabupaten Kampar telah memiliki peraturan bupati mengenai inovasi daerah yangmana dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah

diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Sisi baiknya, Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan beberapa hal sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya :

- a. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kampar
- b. Memberikan kepastian hukum bahwa pelayanan pendidikan di Kabupaten Kampar bebas korupsi melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
- c. Peningkatan Profesionalisme SDM,
- d. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan,
- e. Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
- f. Pengelolaan konsultasi dan pengaduan , salah satunya aplikasi LAPOR,
- g. Pelayanan publik Kabupaten Kampar telah melakukan perubahan mengadaptasi perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Beberapa aplikasi pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7. Aplikasi Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Kampar

No	Dinas	Nama Aplikasi	Tahun Beroperasi	Sasaran Aplikasi	Alamat Aplikasi
1	DPMPSTSP	E-Payment Sistem Informasi Pembayaran Retribusi	2022	Masyarakat	<a href="https://dpmpstsp.kamparkab.go.id/pages/inovasi-2022#">https://dpmpstsp.kamparkab.go.id/pages/inovasi-2022#</a>
2	DPMPSTSP	Syarat Lengkap Satu Hari Terbit Izin(Satu Hati)	2022	Masyarakat	<a href="https://dpmpstsp.kamparkab.go.id/pages/inovasi-2022#">https://dpmpstsp.kamparkab.go.id/pages/inovasi-2022#</a>

3	DPMPTSP	TRACKING SICANTIK : Aplikasi Agar memudahkan Pelaku Usaha untuk mengetahui sampai dimana Proses Perizinan dan Non Perizinan	2022	Masyarakat	<a href="https://dpmptsp.kam&lt;br/&gt;parkab.go.id/pages/i&lt;br/&gt;novasi-2022#">https://dpmptsp.kam parkab.go.id/pages/i novasi-2022#</a>
4	DPMPTSP	Sistem informasi Database perizinan qr Code (sidaq)	2022	Masyarakat	<a href="https://dpmptsp.kam&lt;br/&gt;parkab.go.id/pages/i&lt;br/&gt;novasi-2022#">https://dpmptsp.kam parkab.go.id/pages/i novasi-2022#</a>
5	DPMPTSP	Informasi layanan Cepat berusaha (info la Cu)	2022	Masyarakat	<a href="https://dpmptsp.kam&lt;br/&gt;parkab.go.id/pages/i&lt;br/&gt;novasi-2022#">https://dpmptsp.kam parkab.go.id/pages/i novasi-2022#</a>
6	DPMPTSP	Mambolo OSS	2022	Masyarakat	
7	Badan Pendapatan Daerah	SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah)	2022	Perangkat daerah	
8	DIPERSIP	Geliat Kamu (Gerakan Literasi digital untuk kesejahteraan Kampar Maju)	2022	Masyarakat	
9	RSUD	ASMARA	2022	Masyarakat	
10	RSUD	STIMULUS	2022	Masyarakat	
11	Dinas KETAPANG	Ocu Mapan	2022	Masyarakat	
12	Dinas Perikanan	Safari Gemari	2022	Masyarakat	

13	PMD	Halaman Kampung desa digital Sungai Petai	2022	Masyarakat	
14	DisdukKBP 3A	Gemilang	2022	Masyarakat	
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	E-Monitoring Kepala Dinas Kabupaten Kampar	2020	Kepala Dinas	E-Monitoring Kepala Dinas Kabupaten Kampar
16	Badan Pendapatan Daerah	Pusat Data dan Arsip BAPENDA	2020	Himpunan Arsip Digital BAPENDA Kabupaten Kampar	bapenda.kamparkab. go.ig/Arsip
17	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	SISBAPER (Sistem Barang Persediaan)	2019	Pengelolaan Barang Persediaan	Sisbaper- kamparkab.id
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	E-WARTAWAN	2019	Media	e- wartawan.kamparkab .go.id
19	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Gaji Taspen	2011	Pengelolaan Data Pembayaran Gaji PNS	114.6.226.99:1234
20	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	E-Payment	2018	Pembayaran Dana APBD (SP2D)	114.6.226.100:8080/ 114.6.226.101:90

21	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Web DISPARBUD	2017	Publikasi dan Promosi	Disparbud.kamparkab.go.id
22	Sekretaris Daerah	JDIH Kabupaten Kampar	2016	Perangkat daerah dan Masyarakat Umum	Jdih.kamparkab.go.id
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	SIKPD Modul Aset	2012	Pengelolaan Barang Milik Daerah	114.6.226.101:8888
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2010	Pengelolaan Keuangan Daerah	114.6.226.101

Sumber : Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023

Terkait dengan RB TEMATIK, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan tim Koordinasi masing-masing tema, sebagai berikut:

1. SK Bupati Kampar NO 50/224/III/2018 tentang Pembentukan tim koordinasi, sekretariat dan kelompok kerja penanggulangan kemiskinan kabupaten Kampar. Tim ini dibentuk untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
2. SK Bupati Kampar NO 500/147/I/2021 tentang Pembentukan tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Kampar.

## BAB III

### AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar

Di tengah kompleksitas dan tuntutan masyarakat yang meningkat di seluruh dunia, Reformasi Birokrasi (RB) menjadi sebuah kebutuhan. Pada akhirnya, tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui RB adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 dirilis, Road Map RB telah digunakan dalam tiga periode. Penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, peningkatan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), dan integrasi pelayanan publik dalam pusat pelayanan publik adalah beberapa peningkatan dalam tata kelola pemerintahan. Tujuan akhir dari Grand Design RB 2010–2025 adalah mewujudkan birokrasi Indonesia yang berkualitas internasional.

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh berbagai pihak terhadap pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir, tidak ada kemajuan substansial dalam indikator pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, dan pemberantasan korupsi di negara ini. Karena tujuan dan sasaran strategis RB tidak terhubung secara langsung dengan berbagai indikator yang relevan, kondisi ini dianggap berkontribusi. Meskipun indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan sebagai indikator tujuan Road Map RB 2020–2024 sebelum penajaman, program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Akibatnya, salah satu fokus penajaman Road Map RB 2020–2024 adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berpengaruh terhadap pembangunan nasional, dan lebih menunjukkan cara menyelesaikan berbagai masalah birokrasi di Indonesia. Pada tabel berikut dapat dilihat tujuan dan sasaran beserta target capaian indikatornya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 merupakan peraturan yang berhubungan dengan reformasi birokrasi di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang serupa dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pelayanan publik, terdapat perbedaan dalam sasaran yang ingin dicapai. Berikut adalah perbedaan antara tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang tercantum dalam kedua peraturan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 terdapat 2 tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah
2. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Serta 5 Sasaran yang ingin diraih, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah.
2. Penyederhanaan prosedur administrasi pemerintah daerah.
3. Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah.
4. Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
5. Perbaiki tata kelola pemerintah daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Nomor 3 Tahun 2023, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah daerah.
2. Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah.
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah.
3. Peningkatan sistem manajemen kinerja dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintah daerah.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah daerah.

Perbedaan dalam sasaran tersebut menunjukkan penekanan yang berbeda dalam upaya reformasi birokrasi. Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 lebih menekankan pada peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi informasi, dan peningkatan tata kelola pemerintah daerah. Sementara itu, Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 lebih menekankan pada penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan sistem manajemen kinerja, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam Road Map RB 2020–2024 sebelum dan setelah penajaman terlihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Penggunaan Indikator Hasil Antara Road Map RB sebelum penajaman pada Road Map RB setelah penajaman

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB sebelum penajaman	Kondisi sampai 2021	Dalam Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	Belum tersedia	Indikator 1 tidak dilanjutkan
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	Sudah tersedia	Indikator 2 dan 3 dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan, untuk mengukur
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	Belum tersedia	Dilanjutkan dan disinergikan dengan Indikator 5
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE	Indikator 5 s.d 8 sudah tersedia	Indikator 5 dilanjutkan
	6. Indeks Pengawasan Kearsipan		Indikator 6 s.d 8 dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator 5
	7. Indeks Pengelolaan Keuangan		
	8. Indeks Pengelolaan Aset		
	9. Indeks Pemerintahan Daerah	Indikator 9 belum tersedia	Indikator 9 tidak dilanjutkan

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10. Indeks Profesionalitas ASN  11. Indeks Sistem Merit  12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Indikator 10 s.d 12 sudah tersedia	Indikator 10 s.d 12 diintegrasikan ke dalam Indikator 11
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP  14. Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator 13 sudah tersedia  Indikator 14 sudah tersedia	Indikator 13 dan 14 dilanjutkan, disinergikan, disederhanakan
Pengawasan	15. Maturitas SPIP  16. Kapabilitas APIP (IACM)  17. Opini BPK  18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa  19. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indikator 15–19 sudah tersedia	Indikator 15 dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator 13 dan 14  Indikator 16 diintegrasikan dengan Indikator 15  Indikator 17 dilanjutkan dan ditambah tindak lanjut rekomendasi hasil audit  Indikator 18 dilanjutkan, disederhanakan, disinergikan Indikator 5  Indikator 19 digantikan dengan Nilai hasil Survei Penilaian Integritas
Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik  21. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik  22. Survei Kepuasan Masyarakat	Indikator 20–22 sudah tersedia	Indikator 20 dan 21 dilanjutkan, disinergikan Indikator 22 dilanjutkan, disempurnakan

Sumber: Kementerian PANRB

Indikator dan target dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Target Kinerja Tujuan RB

No.	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2021	Target 2024
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah	91,76% Kementerian/ Lembaga Minimal Baik  79,41% Provinsi Minimal Baik  25,79% Kab/Kota Minimal Baik	100% Kementerian/ Lembaga Minimal Baik  100% Provinsi Minimal Baik  70% Kab/Kota Minimal Baik
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan: 9,71 (Sep 2021)  Pertumbuhan Investasi= 9,0% (2021/2020) Realisasi Penanaman Modal 2021: 901,0 Realisasi Penanaman Modal 2020: 826,3	Menurun  Meningkat
		Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI)	CPI: Skor 38 Peringkat 96 dari 180 negara (2021) EGDI: Peringkat ke 88 dari 193 negara (2021)	Meningkat

Sumber: Kementerian PANRB

Tabel 3.3. Target Kinerja Sasaran Strategis RB

No.	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2021	Target 2024
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Kementerian/lembaga: 53,26% Baik Provinsi: 44,12% Baik Kab/Kota: 23,58% Baik	100% Kementerian/lembaga Baik 80% Provinsi Baik 50% Kab/Kota Baik
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kementerian/lembaga: 93,75% Baik Provinsi: 100,00% Baik Kab/Kota: 66,73% Baik	100% kementerian/lembaga/ pemerintah Daerah minimal Baik
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kementerian/lembaga: 95% WTP Provinsi: 100% WTP Kab/Kota: 91,91%	100% kementerian/lembaga/ pemerintah daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding (sumber: Kementerian PANRB)	6,90% (2022)	7,66%
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)	60,9% (2022)	67,142%
		Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)	Nilai rata-rata Kementerian/lembaga: 81,1% Prov: 69,3% Kab/Kota: 71,4%	Nilai rata-rata kementerian/lembaga/pemerintah daerah meningkat

	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Kementerian PANRB)	Nilai rata-rata Kementerian/lembaga: 88,06 Prov: 86,15 Kab/Kota: 74,89	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat
--	--	--	---

Sumber: Kementerian PANRB

Berikut penjelasan atas masing-masing indikator yang digunakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai yang tertera pada Kamus Indikator pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023.

Tabel 3.4. Penjelasan Indikator pada Sasaran Strategis I

No.	Indikator Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
1.	Indeks SPBE	<p>Definisi operasional: Indikator yang mengukur capaian penerapan SPBE pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan tingkat nasional. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik.</p> <p>Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian.</p> <p>Sumber data: Hasil penilaian SPBE Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.</p>
2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	<p>Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat capaian kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan RB. Penilaian dilakukan terhadap dua hal, yaitu 1) kontribusi kementerian/lembaga/pemerintah daerah terhadap pencapaian kinerja sasaran pembangunan atau capaian Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D); dan 2) capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.</p> <p>Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputy Bidang</p>

		<p>RBKUNWAS untuk menilai capaian indikator kinerja utama kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menilai Capaian kontribusi kementerian/lembaga terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional</p> <p>Sumber data: Hasil Monev RKP Kementerian PPN/Bappenas; Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang RBKUNWAS Kementerian PANRB, Laporan evaluasi LPPD Ditjen Otonomi Daerah, Laporan Capaian Indikator makro pembangunan BPS.</p>
3.	Capaian Akuntabilitas Keuangan	<p>Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas keuangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara (APBN/APBD). Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu : 1) tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan, dan 2) tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan.</p> <p>Instansi penanggung jawab pengukuran: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <p>Sumber data: Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan Hasil Monev tindak lanjut rekomendasi BPK.</p>

Sumber : PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023

Tabel 3.5. Penjelasan Indikator pada Sasaran Strategis II

No.	Indikator Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
1.	Nilai Employer Branding ASN	<p>Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang menerima pelayanan.</p> <p>Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur.</p> <p>Sumber data: Hasil survei employer branding</p>

2.	Indeks BerAKHLAK	<p>Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.</p> <p>Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur.</p> <p>Sumber data: Hasil survei BerAKHLAK ASN.</p>
3.	Nilai Survei Penilaian Integritas	<p>Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat integritas organisasi pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu stakeholder yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal.</p> <p>Instansi penanggung jawab pengukuran: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Sumber data: Hasil SPI KPK.</p>
4.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	<p>Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.</p> <p>Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik.</p> <p>Sumber data: Hasil SKM.</p>

Sumber : PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023

Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar diturunkan dari sasaran, tujuan, indikator dan target pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Riau, yaitu :

1. Indeks SPBE
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja
3. Capaian Akuntabilitas Keuangan
4. Opini BPK
5. Tindaklanjut hasil pemeriksaan
6. Employer Branding ASN
7. Indeks BerAKHLAK

8. Nilai Survei Penilaian Integritas
9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
10. Persentase Penduduk Miskin
11. Nilai Realisasi Investasi
12. Prevalensi Stunting
13. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
14. Tingkat Inflasi

Indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini diambil dari indikator yang berakar dari isu strategis RB Tahun 2020-2024 baik dari isu strategis hulu maupun isu strategis hilir. Pada tabel di bawah ini ditampilkan indikator dan target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2024.

Tabel 3.6. Indikator dan Target pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Indikator	Target Nasional 2024	Sumber
1	Indeks SPBE	50% Kab/Kota Baik (Indeks SPBE > 2,6)	PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023
2	Capaian Akuntabilitas Kinerja	100% kementerian/ lembaga/ daerah minimal Baik	PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023
3	Capaian Akuntabilitas Keuangan:	100% kementerian/ lembaga/ daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023
4	Opini BPK	WTP pada 85 Kabupaten	RPJMN 2020- 2024
5	Tindaklanjut hasil pemeriksaan		
6	Employer Branding ASN	7,66%	PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023
7	Indeks BerAKHLAK	67,142%	PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023
8	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai rata-rata kementerian/ pemerintah lembaga/ daerah meningkat	PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023
9	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata kementerian/ pemerintah lembaga/ daerah meningkat	PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023

10	Persentase Penduduk Miskin	23,5 – 24 % (Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal)	RPJMN 2020-2024
11	Nilai Realisasi Investasi	49,7 % (Kontribusi realisasi investasi luar Jawa)	RPJMN 2020-2024
12	Prevalensi Stunting	14 %	RPJMN 2020-2024
13	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri		
14	Tingkat Inflasi	2,7 %	RPJMN 2020-2024

Sumber : Hasil olahan tim penyusun

Masing-masing indikator ini kemudian diturunkan target untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar sebagaimana pada tabel di bawah ini. Target yang ditetapkan merupakan target yang direncanakan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk mendukung pemenuhan target nasional.

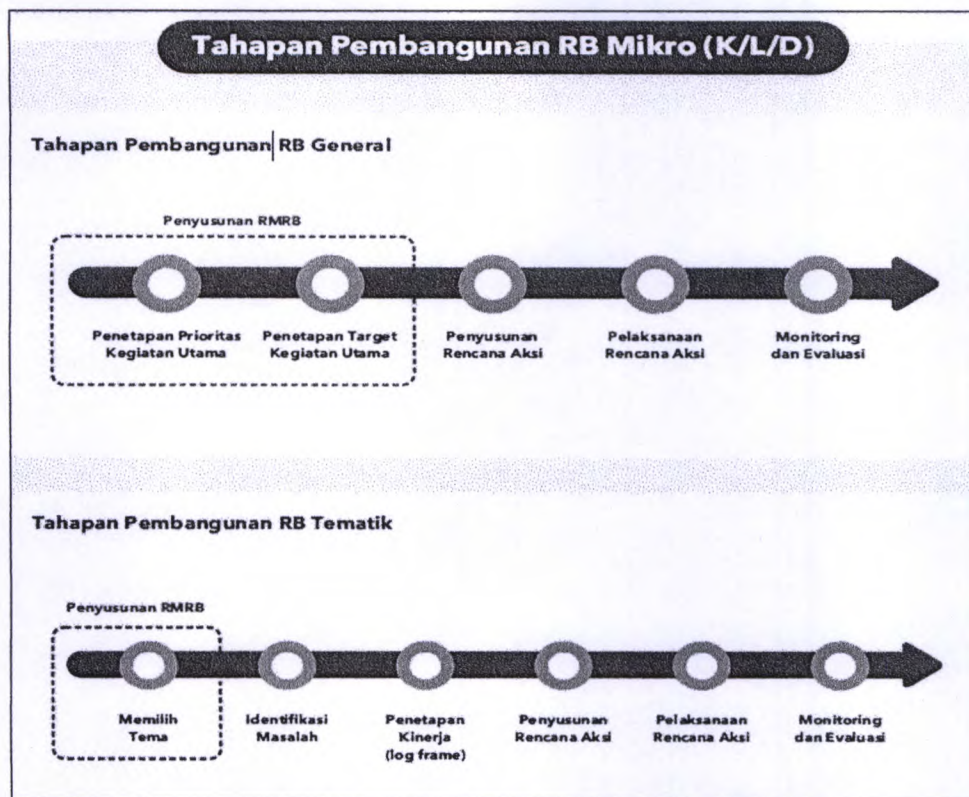
Tabel 3.7. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		
				2023	2024	2025 (Peralihan/Transisi)
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	2,22	2,6	3	3,5
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tindak lanjut hasil pemeriksaan				
		Tindak lanjut pemeriksaan Eksternal / BPK	78,78	79,2	87	89

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		
				2023	2024	2025 (Peralihan/Transisi)
		Tindak lanjut pemeriksaan Internal	87,68	87,68	87,68	87,68
		Tindak lanjut pemeriksaan Internal	64,56	66,16	70	75
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	na			
		Indeks BerAKHLAK	na			
		Nilai Survei Penilaian Integritas	70,31	71		
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	86,98	88	89	90
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Persentase Penduduk Miskin	7,12	7,51	7,25	7,04
		Nilai Realisasi Investasi	6.227.380	2.526.192		
		PMDN				
		PMA				
Prevalensi Stunting		14,5	16	14	12	
Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri		25	40	50	50	
Tingkat Inflasi		7,04	1,82			

Sumber : Hasil olahan tim penyusun

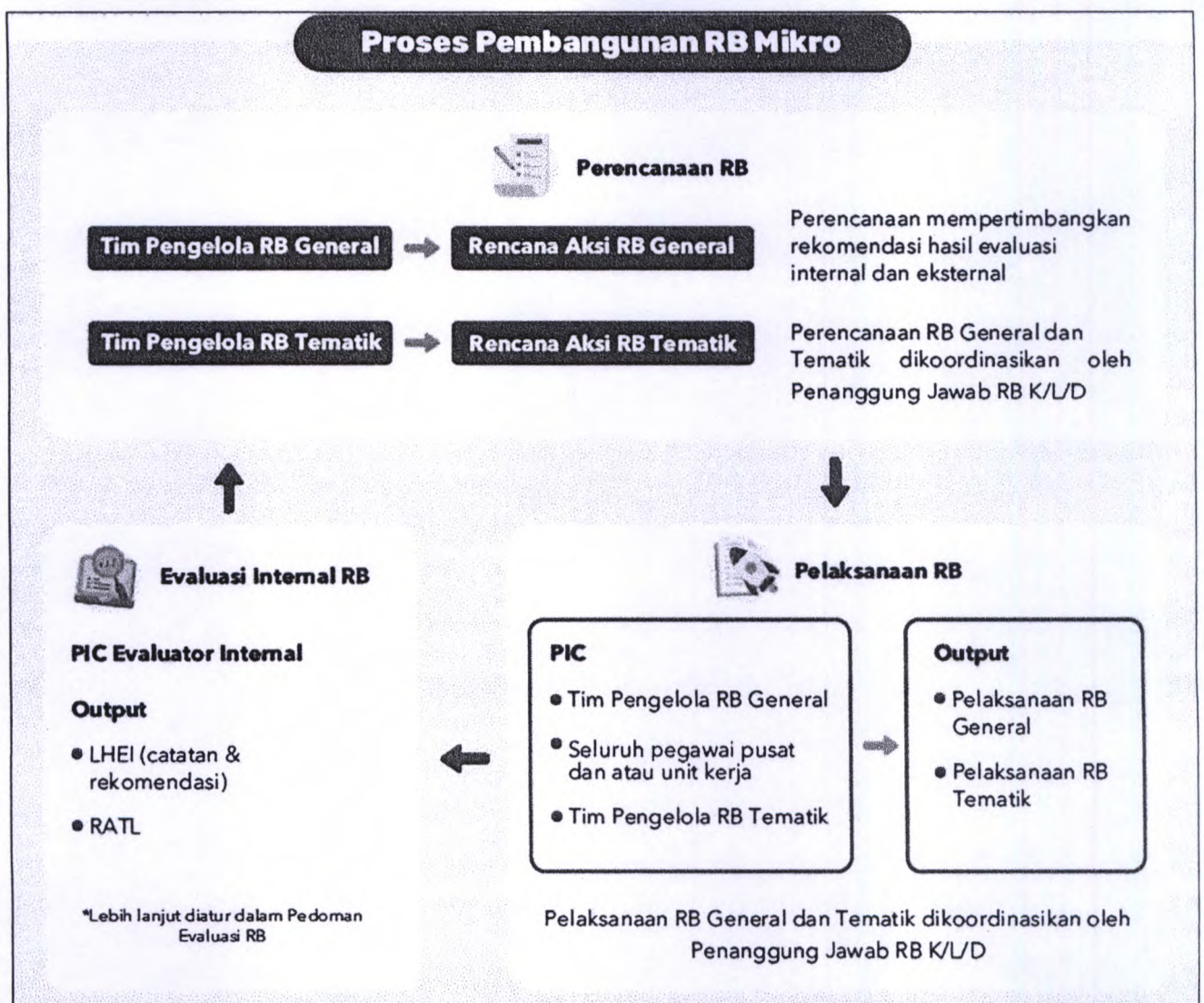
Terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan RB Mikro, baik RB General maupun RB Tematik. Tahapan Pembangunan RB General terdiri dari 5 tahapan, sedangkan tahapan Pembangunan RB Tematik terdiri atas 6 tahapan sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Tahapan Pembangunan RB Mikro (K/L/D)

Sumber : Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro

Proses Pembangunan RB Mikro meliputi proses perencanaan RB, pelaksanaan RB, dan evaluasi internal RB yang saling berkaitan dengan tujuan peningkatan pelayanan kedepan sebagaimana yang diilustrasikan pada Gambar 3.2. Perencanaan RB melibatkan tim pengelola RB general yang akan menghasilkan suatu rencana aksi RB General dan tim pengelola RB Tematik yang akan menghasilkan rencana aksi RB Tematik. Pelaksanaan RB melibatkan PIC yang terdiri dari tim pengelolal RB General dan Tematik serta seluruh pegawai pusat dan atau unit kerja yang kemudian akan menghasilkan output berupa pelaksanaan RB General dan Tematik. Evaluasi internal RB melibatkan PIC evaluator internal dan akan menghasilkan output berupa LHEI (catatan dan rekomendasi) serta RATL (Rencana Aksi Tindak Lanjut) yang kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan RB pada periode setelahnya.



Gambar 3.2. Proses Pembangunan RB Mikro

Sumber : Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro

### 3.2. Reformasi Birokrasi General Kabupaten Kampar

Sebagaimana yang dijelaskan pada Gambar 3.1 bahwa terdapat beberapa tahapan pembangunan RB General, yaitu:

1. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB), meliputi:
  - a. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama
  - b. Penetapan Target Kegiatan Utama
2. Penyusunan Rencana Aksi
3. Pelaksanaan Rencana Aksi
4. Monitoring dan Evaluasi

#### 3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Sesuai dengan *Road Map* RB, K/L/D (level mikro) melaksanakan RB dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map RB Nasional, serta bersifat mandatory.
2. Dimensi Instansional merupakan Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RB.

Pada tahap ini, dalam hal K/L/D memiliki keterbatasan sumber daya, maka K/L/D perlu melakukan tahapan identifikasi tingkat prioritas seluruh Kegiatan Utama tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi prioritas Kegiatan Utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan Utama *mandatory* bersifat wajib seluruhnya dan lebih prioritas dibandingkan Kegiatan Utama inisiatif K/L/D
- b. Seluruh Kegiatan Utama, baik yang *mandatory* maupun inisiatif K/L/D harus dilengkapi dengan indikator yang terukur
- c. Identifikasi prioritas Kegiatan Utama didasarkan pada empat faktor sesuai contoh atau lebih jika ada faktor lain yang dirasa perlu oleh K/L/D
- d. Skor masing-masing faktor dalam skala 1-10 (atau skala lainnya), kemudian diakumulasi
- e. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi pertimbangan dalam menetapkan target tahunan RB K/L/D.

Tabel 3.8. Form Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)	Rangking
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	10	2	5	17	18
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	10	10	4	24	3
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	5	10	25	2

4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	8	5	23	7
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital ( Khusus Pemerintah Daerah )	10	5	7	22	9
6	Pembangunan Zina Integritas di Unit Kerja	10	8	8	26	1
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	6	8	24	3
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	4	8	22	9
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	5	8	23	7
10	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	10	5	7	22	9
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	10	5	5	20	13
12	Pelaksanaan Arsip Digital	10	6	8	24	3
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	3	5	18	16
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	10	3	4	17	18
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	4	8	22	9
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	2	5	17	18
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	2	8	20	13
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	3	5	18	16
19	Penguatan Sistem Merit	10	4	10	24	3
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	5	5	20	13
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	2	3	15	21

Sumber : Olahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, 2023

Kegiatan utama dengan bobot tinggi ditetapkan sebagai Kegiatan Utama yang prioritas. Tabel ini adalah untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar jika memiliki keterbatasan dalam menetapkan mana Kegiatan Utama yang perlu segera dilakukan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tidak memiliki permasalahan keterbatasan sumber daya, maka seluruh Kegiatan Utama perlu dilakukan seluruhnya.

### 3.2.2. Penetapan Target Kegiatan Utama

Target Kegiatan Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan RB Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Penetapan Target ini perlu memperhatikan target minimal Road Map RB Nasional. Target Kegiatan Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dituangkan seperti pada table berikut.

Tabel 3.9. Target Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Rangking	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahunan		Unit / Satuan Kerja Pelaksana	
				2022	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	1	ZI	1	1	1	Inspektora t	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	2	Indeks SPBE	1,8	2,2	3,1	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja
3	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	3	Skor SPIP	3,2	3,5	3,8	Inspektora t	Seluruh Unit Kerja
4	Penguatan Sistem Merit	4	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang Terlayani	86.5	133.5	200	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
5	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	5	Jumlah PD mengimplementasikan Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	53	53	53	ORG / BKPSDM	Seluruh Unit Kerja

6	Pelaksanaan Arsip Digital	6	Jumlah Seluruh OPD yang dilakukan pembinaan kearsipan digital	28	31	31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Unit Kerja
7	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	7	Nilai SAKIP	B	B	B	Inspektora t / Organisasi	Seluruh Unit Kerja
8	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	8	Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK	100%	100%	100%	Inspektora t	Seluruh Unit Kerja
			Kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia	100%	100%	100%		
			Kegiatan Pendampingan/Evaluasi Sosialisasi STRANAS PK	100%	100%	100%		
			Kegiatan LHKPN/LH KASN	100%	100%	100%		
			Kegiatan Saberpungli	100%	100%	100%		
			Sosialisasi/Evaluasi Benturan Kepentingan dan Gratifikasi	100%	100%	100%		
			Monitoring SPI dan Monitoring SPM	100%	100%	100%		

9	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital ( Khusus Pemerintah Daerah )	9	Penyelenggaraan Transformasi Digital	20%	30%	50%	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja
10	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapori	50%	70%	85%	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja
11	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	11	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	82	85	88	BAGIAN ORGANISASI	Seluruh Unit Kerja
12	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	12	Tersusunnya rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah	97	100	100	BPKAD	Seluruh Unit Kerja
13	Penguatan Manajemen Talenta ASN	13	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang Terlayani	50.04	54.19	70	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
14	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	14	Jumlah Peraturan Produk Hukum	3	3	3	Bagian Hukum	Seluruh Unit Kerja
15	Pelaksanaan Core Values ASN	15	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang Terlayani	0	0	1	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
16	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	16	Membangun meta data statistik sektoral	32	32	32	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja
17	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	17	Meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur Sipil Negara	47.69	65.51	90	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja

18	Penyederhanan Birokrasi (Penyederhanan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	18	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	100	100	BAGIAN ORGANISASI	Seluruh Unit Kerja
19	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	19	Penguatan SDM UKPBJ	18	18	18	BAGIAN PBJ	Seluruh Unit Kerja
20	Penataan Jabatan Fungsional	20	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang Terlayani	55%	60%	80%	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	21	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	82	85	88	BAGIAN ORGANISASI	Seluruh Unit Kerja

Sumber : Olahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, 2023

Hal-hal minimal yang perlu ada adalah:

- a. Kegiatan Utama diambil berdasarkan hasil identifikasi Prioritas Kegiatan Utama
- b. Terdapat indikator Kegiatan Utama yang terukur dan relevan
- c. Terdapat target tahunan yang terukur dan optimis
- d. Koordinator adalah unit/satuan kerja yang memiliki fungsi untuk mengawal dan mengkoordinir Kegiatan Utama
- e. Pelaksana adalah unit/satuan kerja yang perlu melaksanakan Kegiatan Utama
- f. Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil (bukan output) dan memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RB

### 3.2.3. Rencana Aksi

Rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk memiliki rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah:

1. Meningkatkan efisiensi: Dengan adanya reformasi birokrasi, tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penataan kembali prosedur, pengurangan birokrasi yang berlebihan, dan penggunaan teknologi informasi yang tepat, birokrasi dapat beroperasi secara lebih efisien. Hal ini akan mengurangi biaya administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Reformasi birokrasi dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam tindakan dan keputusan pemerintah daerah. Dengan peningkatan transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, mengetahui bagaimana kebijakan dibuat, dan memonitor penggunaan dana publik. Akuntabilitas juga ditingkatkan melalui peningkatan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja birokrasi.
3. Meningkatkan pelayanan publik: Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui perbaikan prosedur administrasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan penggunaan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat.
4. Mengurangi korupsi dan nepotisme: Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering terjadi di dalam birokrasi pemerintah daerah. Dengan adanya tata kelola yang lebih baik, penegakan hukum yang ketat, dan penggunaan sistem yang transparan, potensi korupsi dapat dikurangi dan pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pelayanan publik yang adil dan berkeadilan.
5. Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi: Dengan adanya birokrasi yang efisien dan transparan, pemerintah daerah dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Prosedur yang sederhana dan cepat, serta regulasi yang jelas, akan memberikan kepastian kepada para investor. Selain itu, dengan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah penting karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kepercayaan dan partisipasi publik terhadap pemerintah daerah.

Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map RB instansi. Rencana aksi secara umum terdapat dua tipe yaitu mandat instansi yang dirumuskan sesuai tupoksi instansi dan inisiatif instansi yang merupakan inovasi dari instansi terkait.

Tabel 3.10. Rencana Aksi RB General

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
1	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	ZI	1	Pengisian LHE ZI	1	Perangkat Daerah	0	0	0	1	1	Rp 8.400.000	Inspektoral	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,2	Melakukan MONEV TIK	OPD	Jumlah OPD Yang di MONEV	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Tidak Tersedia Anggaran	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja
3	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Skor SPIP	3,5	Sosialisasi dan Pendampingan SPIP	15	Perangkat Daerah	0	0	15	0	15	Rp 17.500.000	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja
4	Penguatan Sistem Merit	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang Terlayani	133.5	Pemenuhan Dokumen Pelaksanaan Sistem Merit	Skor Indeks	Skor Penilaian Sistem Merit	86,5	10	12	25	133.5	Tidak Tersedia Anggaran	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
5	Pelaksanaan Sistem Kerja	Jumlah PD mengimple mentasikan Sistem	53	Penetapan Perbup Sistem Kerja	1	Perbup Sistem Kerja	0	0	0	1	1	Tidak Tersedia Anggaran	ORG / BKPSDM	Seluruh Unit Kerja

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana
6	Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	75	31	Satuan	Jumlah Arsip Dinamis dan Arsip Statis serta Arsip Vital	234	234	234	236	938	Rp 370.467.900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Unit Kerja
7	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	B	Penilaian SAKIP tahun 2023	Dokumen	1	1	0	0	0	1		Inspektori Organisasi	Seluruh Unit Kerja
8	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Sosialisasi Nilai-nilai anti korupsi	100%	Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK	Dokumen	1	0	0	1	1	1	Rp 159.450.000	Inspektori	Seluruh Unit Kerja
				Kegiatan Peringatan	Dokumen	1	0	0	1	1	1	Rp 38.060.0		

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Unit/Satuan Kerja Pelaksana				
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana		
				Hari Anti Korupsi Sedunia												
				Kegiatan Pendampingan/Evaluasi Sosialisasi STRANAS PK	Dokumen	1	0	0	0	1	1		Rp 29.350.000			
				Kegiatan LHKPN/LH KASN	Dokumen	1	0	1	0	0	1		Rp 6.500.000			
				Kegiatan Saberpongli	Dokumen	1	0	0	0	1	1		Rp 168.630.000			
				Sosialisasi/Evaluasi Benturan Kepentingan dan Gratifikasi	Dokumen	1	0	0	0	1	1		Rp 8.750.000			
				Monitoring SPI dan Monitoring SPM	Dokumen	1	0	1	1	0	1		Rp 7.500.000			
9	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (Khusus Pemerintah)	Penyelenggaraan Transformasi Digital	30%	Peningkatan Jaringan Internet dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Mbps	Jumlah Bandwith	0,25	0,25	0,25	0,25	1		Rp 600.000.000	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja	

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian						Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana	
	Daerah )			dan Komunikasi											
			50%	Peningkatan SDM dibidang Teknologi	Desa dan Kelurahan	sosialisasi dan website digitalisasi	0	0,3	0,7	0	1	Rp 198.487.000	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja	
			50%	Jaminan Keamanan digital	Giga Byte	Hardware dan Software Firewall	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Tidak Tersedia Anggaran	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja	
10	Penguatan Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan	Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan	70%	Peningkatan pelayanan Publik	OPD	Sosialisasi dan Peningkatan sumber daya pengelola	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Tidak Tersedia Anggaran	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja	
			70%	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pelayanan Publik	Dokumen	Penyusunan Dokumen	Sudah Terlaksana (Mandiri)	Sudah Terlaksana (Mandiri)	Sudah Terlaksana (Mandiri)	Sudah Terlaksana (Mandiri)	Sudah Terlaksana (Mandiri)	Tidak Tersedia Anggaran	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja	
1.1	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	85	Penilaian Kepatuhan tahun 2023	6	Unit Kerja	0	0	6	0	6	Rp 150.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja	
1.2	Penguatan Pengelolaan Keuangan	Tersusunnya rencana keuangan tahunan Pemerintah	100	Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai dengan	laporan	persentase peningkatan kapasitas pengelolaan	25	25	25	25	100	Rp 395.261.750.392	BPKAD	Seluruh Unit Kerja	

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana	
	n dan Aset	Daerah		dokumen perencanaan, standar satuan harga, analisa belanja dan standar pelayanan		keuangan daerah									
13	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Meningkatnya Pelayanan Kepegawain yang Terlayani	54.19	Pengumpulan Data, Diklat, Pelatihan, Bimbingan Teknis yang Telah diikuti ASN Kab. Kampar	Persentase ASN yang telah mendapatkan Peningkatan Kompetensi minimal 20 jam/tahun	Jumlah ASN yang telah mendapatkan pengembangan Kompetensi minimal 20 jam/tahun	5%	15%	15%	20%	55%	Tidak Tersedia Anggaran	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja	
14	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Jumlah Peraturan Produk Hukum	3	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dokumen	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1	1		1	3	Rp 272.669.900	Bagian Hukum	Seluruh Unit Kerja	
15	Pelaksanaan Core Values ASN	Meningkatnya Pelayanan Kepegawain yang Terlayani	1	Perancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Budaya	Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja di Lingkungan	Perancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	0	0	0	1	1	Tidak Tersedia Anggaran	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja	

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana
16	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Membangun meta data statistik sektoral	32 OPD	Penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Kampar	32	Budaya Kerja di Lingkungan Pemkab Kampar	0	10	22	0	32	Rp 117.047.000	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja
17	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Meningkatkan kapasitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara	65.51	Memberikan pelatihan kepada ASN dan membuka layanan konsultasi pengisian sasaran kerja	persentase ASN yang telah melaporkan usulan target kinerja pada aplikasi <a href="https://kkn.go.id">https://kkn.go.id</a>	Jumlah ASN Kabupaten Kampar yang melaporkan hasil kerja pada E-LAPKIM	20%	40%	60%	98%	98%	Rp 164.245.000	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
18	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	Penyederhanaan Struktur Organisasi	Jumlah PD yang di sederhanakan	Perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja

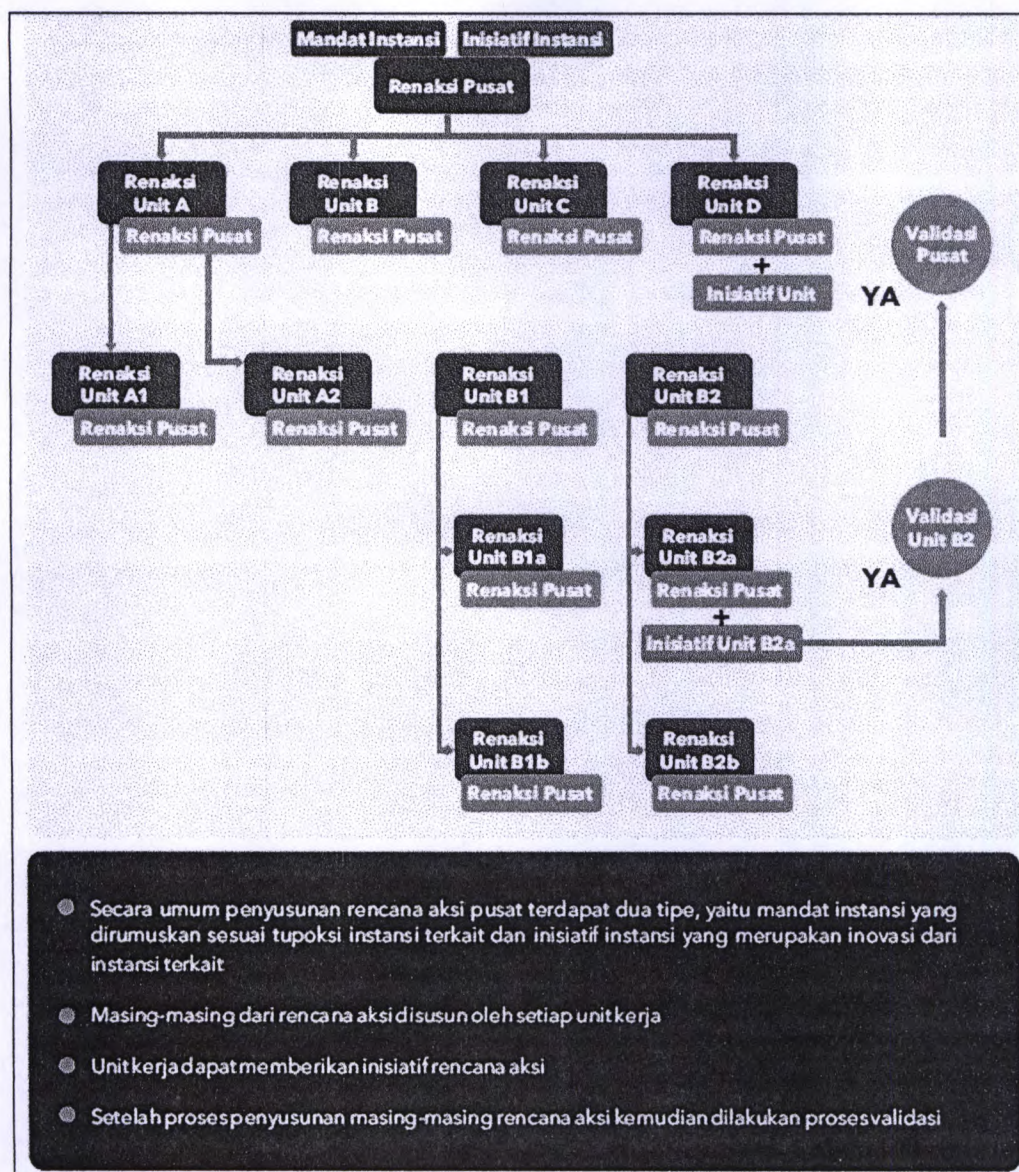
No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
19	organisasi berbasis kinerja dan agile Penguatan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Penguatan SDM UKPBJ	18	Pembinaan SDM dan Kelembagaan	18 orang	Tercapainya SDM UKPBJ yang berkualitas dan kompeten	0	0	5	13	18	Rp 324.250.000	BAGIAN PBJ	Seluruh Unit Kerja
20	Penataan Jabatan Fungsional	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian yang Terlayani	60%	Pendampingan dan konsultasi/bimtek PBJ Membukan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional dan memfasilitasi uji kompetensi	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional	jumlah kebutuhan jabatan fungsional yang terpenuhi	0	0	0	2	2	Tidak Tersedia Anggaran	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	85	Kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai	Nilai	0	0	0	85	85	Rp 150.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja

Sumber : Olahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, 2023

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Aksi RB General:

1. Aksi yang dimaksud harus merupakan aksi yang memiliki dampak langsung terhadap capaian Kegiatan Utama.
2. Rencana aksi harus jelas dan terukur.
3. Target triwulanan berupa akumulasi dari triwulan-triwulanan sebelumnya.
4. Rencana Aksi merupakan output dari Tim Pengelola RB General, jika pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terdapat Tim Pengelola RB General di level unit kerja, maka Tim tersebut perlu menyusun Rencana Aksi RB Unit Kerja.
5. Rencana Aksi RB Unit Kerja dapat terdiri dari penjabaran atas Rencana Aksi level pusat dan inisiatif unit kerja jika diperlukan.
6. Jika unit kerja memiliki Rencana Aksi di luar mandat level pusat, maka inisiatif tersebut harus melalui proses validasi level pusat terlebih dulu sebelum dimasukkan sebagai Rencana Aksi RB Unit Kerja.
7. Rencana Aksi RB General dan Tematik dapat beririsan, sehingga dalam proses perencanaan RB mikro, perlu dikoordinasikan secara komprehensif oleh Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Penjabaran Rencana Aksi RB General dari level pusat ke unit kerja dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.3. Penyusunan Rencana Aksi RB General  
 Sumber : Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro

Pelaksanaan RB General didasarkan pada perencanaan RB yang telah ditetapkan. Tahapan ini merupakan hal strategis yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan unsur terkait. Adapun kunci keberhasilan pelaksanaan RB General meliputi:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh anggota

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk berubah (*commitment to change*) merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan RB General. Dengan adanya komitmen kuat yang ditandai munculnya keterlibatan aktif dari pimpinan maupun seluruh jajaran, maka ide-ide luar biasa dan inovatif akan lebih mudah muncul.

Saat ini baik pimpinan maupun jajaran dituntut semakin cepat tanggap agar mampu menangkap pesan dari masyarakat untuk membawa organisasi ke arah yang tepat dan lebih maju. Komitmen

dalam hal ini adalah berorientasi hasil dan fokus pada akar masalah; inovatif dan terbuka atas ide baru; pengalaman dan pengetahuan; adaptif dan memanfaatkan teknologi; mengedepankan public value; serta kolaboratif dan partisipatif.

## 2. Menyelesaikan akar masalah

Seringkali dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tidak berupaya mencari akar permasalahan, sehingga masalah yang sama muncul kembali. Dalam pelaksanaan RB perlu untuk menyelesaikan akar masalah sehingga tidak hanya fokus pada permasalahan yang terjadi, namun mengetahui dengan jelas penyebab yang signifikan untuk diintervensi sesuai Rencana Aksi yang telah disusun.

## 3. Kolaborasi

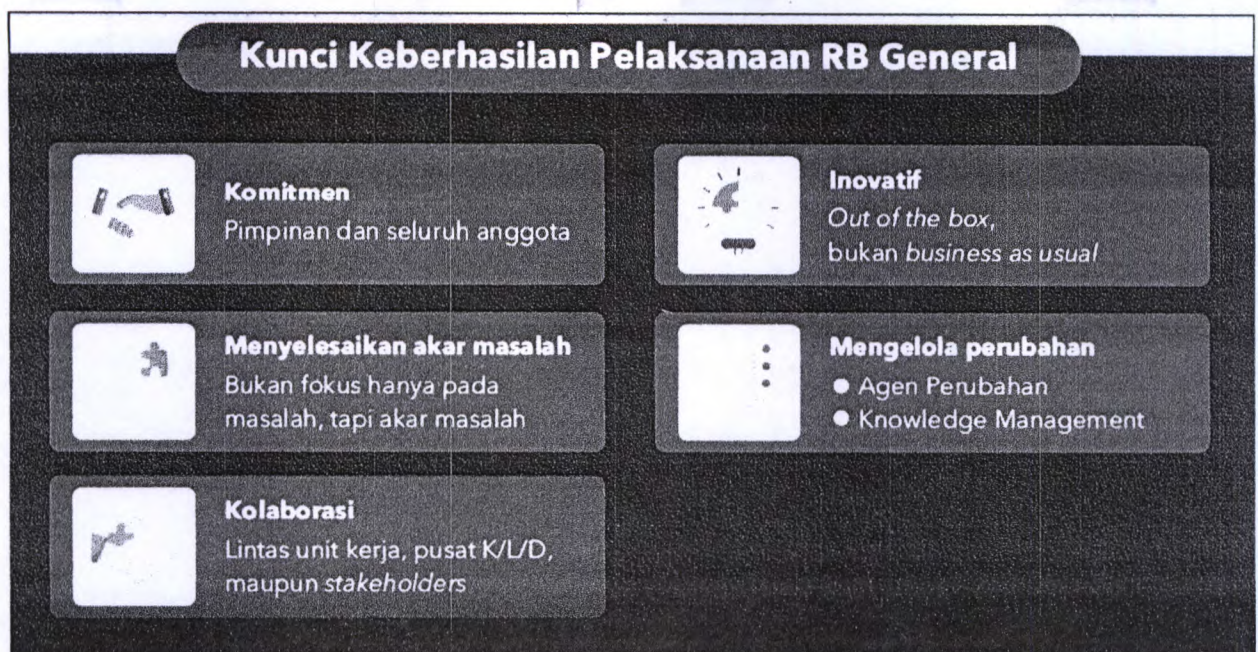
Kolaborasi diperlukan untuk mempercepat tercapainya tujuan RB, baik kolaborasi internal, lintas unit kerja, maupun dengan stakeholders terkait. Pada satu sisi, permasalahan RB semakin kompleks, namun di sisi lain pemerintah memiliki berbagai keterbatasan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, isu strategis RB juga dapat berkolaborasi dengan berbagai unsur di luar pemerintah mulai dari swasta, akademisi, masyarakat, Non-Governmental Organization (NGO), dan lain sebagainya.

## 4. Inovatif

Pelaksanaan RB yang semakin tinggi tuntutananya perlu dilakukan dengan cara-cara inovatif, tidak dengan cara-cara yang prosedural dan terlampau birokratis. K/L/D diharapkan dapat terbuka dengan hal-hal baru, berpikir ke depan dan *out of the box*.

## 5. Mengelola perubahan melalui Agen Perubahan dan penerapan *Knowledge management*

Agar resistensi dapat dikurangi dan keberhasilan RB dapat dipercepat, maka dalam pengelolaan perubahan dapat dilakukan dengan strategi Agen Perubahan dan *Knowledge management* yang tepat. Agen perubahan merupakan perorangan/tim yang berperan sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi masukan alternatif solusi, dan penghubung komunikasi dalam proses pembangunan RB. Adapun penerapan *Knowledge management* diharapkan efektif meningkatkan kualitas pemahaman dan persepsi seluruh entitas internal maupun eksternal yang terkait dengan pelaksanaan RB.



Gambar 3.4. Kunci Keberhasilan Pelaksanaan RB  
Sumber : Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro

Agen perubahan yang menjadi salah satu komponen penting dalam menyukseskan pelaksanaan RB memiliki peran sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi Tim Pengelola RB Pusat maupun Tim Pengelola RB Unit dalam mengidentifikasi masalah, memberikan usulan, dan menyusun rencana aksi.
2. Menjadi role model bagi pegawai lain.
3. Sebagai katalis, memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan unit kerja.
4. Sebagai penggerak, perubahan mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan.
5. Sebagai pemberi solusi, memberikan alternatif solusi bagi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan.
6. Sebagai mediator, memperlancar proses perubahan dan membina hubungan antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar instansi/unit kerja.
7. Sebagai penghubung, menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan para pengambil keputusan.

### 3.3. Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Kampar

Angka kemiskinan merupakan salah satu hal yang disorot dalam RB Tematik dimana angka kemiskinan akan menjadi gambaran atas berbagai problematika social terkait. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan mulai dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya

tingkat pendidikan dan keterampilan), motivasi yang rendah, pandangan dalam hubungan kekeluargaan (cara pandang yang menganggap orang tua sebagai beban), terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai (gaji) dan sebagainya.

Tabel 3.11 Angka Kemiskinan di Kabupaten Kampar Tahun 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022
Angka Kemiskinan Kabupaten	7,38	7,82	7,12
Angka Kemiskinan Provinsi Riau	7,04	7	6,84
Angka Kemiskinan Indonesia	10,19	9,71	9,57

Terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,44% pada tahun 2021 di Kabupaten Kampar. Hal tersebut bisa jadi sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19. Namun, angka tersebut turun lagi pada tahun 2022 sebesar 0,7%. Jika dibandingkan kondisi Kampar dgn kondisi kemiskinan di Riau menunjukkan bahwa kemiskinan Kampar diatas rata-rata kemiskinan Provinsi Riau, tetapi masih di bawah angka kemiskinan nasional.

Tabel 3.12 Capaian Investasi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022  
(dalam juta)

	2020	2021	2022
Target	3.496.000	6.272.000	6.227.380
Realisasi	7.581.333,7	7.914.800,7	3.714.110,1

Capaian investasi di Kabupaten Kampar menunjukkan realisasi yang baik pada tahun 2020 hingga 2021 dimana target terpenuhi bahkan jauh melampaui target. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, realisasi mencapai 216% dari target dan pada tahun 2021 sebesar 126%. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi investasi hanya sebesar 59,64% dari target.

Tabel 3.13 Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022
Angka Inflasi	2,24	1,55	7,04

Angka inflasi Kabupaten Kampar pada tahun 2022 sesuai dengan angka yang ditetapkan BI. Sepanjang 2020, tingkat inflasi Indonesia berada di bawah target yang ditetapkan BI yakni 3% plus minus 1%. Kemudian angka inflasi di Kabupaten Kampar mengalami penurunan sebesar 0,69% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan inflasi sebesar 5,49% padahal Tingkat inflasi Indonesia secara umum masih berada

di bawah target yang ditetapkan BI yakni 3% plus minus 1%. Angka inflasi tersebut bahkan jauh diatas angka inflasi tertinggi Indonesia pada Juli 2022, dimana inflasi tercatat sebesar 4,94%.

Tabel 3.14 Capaian Penanganan Stunting Kabupaten Kampar Tahun 2020-2022

	TAHUN		
	2020	2021	2022
Prevalensi Stunting Kabupaten Kampar	23,07	25,7	14,5

Penanganan stunting di Kabupaten Kampar telah menunjukkan hasil yang cukup baik di tahun 2022. Angka prevalensi stunting yang sempat naik di tahun 2021 sebesar 2,63% , kemudian menurun drastis sebesar 11,2% menjadi berada pada angka 14,5%. Kenaikan yang sempat terjadi di tahun 2021 diperkirakan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Penurunan angka prevelansi stunting di Kabupaten Kampar ini sesuai dengan prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022.

### 3.3.1. Menetapkan Tema RB Tematik

Langkah awal dalam kerangka pembangunan RB Tematik adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus RB Tematik pada tahun berjalan. Instansi pemerintah diberikan keleluasaan untuk memilih satu atau lebih dari empat tema yang akan diangkat sebagai fokus RB Tematik. Dalam menetapkan tema, instansi pemerintah perlu berangkat dari evidence berupa data yang kuat dan relevan (*evidence based policy*). Data merupakan komponen penting pada tahap ini karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tema. Data yang digunakan dapat berupa data primer maupun sekunder, baik dari internal maupun eksternal instansi pemerintah.

Metode yang digunakan adalah melalui evaluasi terhadap kinerja diinginkan yang dibandingkan dengan kinerja existing. Setelah melakukan identifikasi terhadap kinerja yang diinginkan dengan kinerja existing yang ada, maka selanjutnya adalah memperhatikan gap yang muncul dari kedua kinerja/kondisi tersebut. Keberhasilan Pelaksanaan RB Tematik tidak terlepas dari kemampuan instansi pemerintah dalam mengenali adanya permasalahan kesenjangan antara kinerja yang sudah ada dengan kinerja yang akan dicapai dalam RB Tematik.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Tema dipilih dari 5 Tema Tematik yang telah ditetapkan yaitu:



Gambar 3.5. Tema RB Tematik

Sumber : Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro

K/L/D dapat memilih tema yang akan diambil berdasarkan hasil analisis atas data yang ada. Dalam memilih tema, instansi pemerintah setidaknya perlu mempertimbangkan lima faktor atau kriteria berikut:

1. Faktor kesesuaian dengan Prioritas K/L/D

Faktor kesesuaian diartikan sebagai upaya K/L/D untuk menemukan kesesuaian tema yang dipilih berdasar kondisi prioritas dan data eksisting yang dimiliki K/L/D. Sebagai contoh, untuk Daerah dapat menemukan kesesuaian dengan meninjau prioritas pembangunan daerah atau tupoksi utama instansi yang ada pada dokumen RPJMD/RPJPD. Artinya suatu tema menjadi masalah khusus dan memperoleh perhatian sehingga dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan K/L/D.

2. Faktor keparahan masalah

Urgensi penyelesaian masalah yang menjadi tupoksi K/L/D menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan tema RB Tematik. Artinya bahwa tema yang dipilih dianggap telah mencapai tahap yang krisis dan tidak dapat diabaikan.

### 3. Faktor dampak terhadap ekonomi/kesejahteraan masyarakat

Dampak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor utama penentu pemilihan tema RB Tematik. Hal ini dikarenakan, apabila tema tersebut tidak dipilih maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak negatif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila tema itu dipilih, maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak positif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

### 4. Faktor potensi

Faktor lain yang juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pemilihan tema adalah adanya potensi yang dimiliki K/L/D. Artinya bahwa tema yang dipilih didasarkan pada aset kekayaan yang dimiliki daerah atau instansi yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan.

### 5. Faktor percepatan kinerja

Percepatan Kinerja K/L/D dalam pelaksanaan pembangunan RB menjadi faktor utama lainnya dalam pemilihan tema RB Tematik. Artinya bahwa ketika ditemukan kondisi yang tidak signifikan negatif pada data yang ada, maka instansi dapat memilih tema yang masih memerlukan percepatan intervensi agar memperoleh hasil kinerja yang lebih optimal.

Tabel 3.15 Form Penetapan Tema

Tema	Sasaran	Indikator	Base line	Target	
				2022	2023
Kemiskinan	Tematik	Persentase Penduduk Miskin	7,12	7,51	7,25
Investasi	Tematik	Nilai Realisasi Investasi	6.227.380	2.526.192	
Digitalisasi Pemerintahan	Tematik	Indeks SPBE	2,22	2,6	3
Inflasi	Tematik	Tingkat Inflasi	7,04	1,82	
Stunting	Tematik	Prevalensi Stunting	14,5	16	14

Peningkatan Produk Dalam Negeri	Tematik	Persentase Produk Dalam Negeri	25	40	50
---------------------------------	---------	--------------------------------	----	----	----

Sumber : Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023

Berikut adalah pengisian form penetapan tema.

Tabel 3.16. Pengisian Form Penetapan Tema

No	Target Tahunan	Kondisi Eksisting	Target	Kesesuaian Prioritas RPJMD/RPD	Keparahan Masalah	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Total	Ranking
1	Kemiskinan	7,12	7,51	10	7	8	7	8	40	1
2	Investasi	6.227.380	2.526.192	10	7	7	7	8	39	2
3	Digitalisasi Pemerintahan	2,22	2,6	10	7	7	7	8	39	2
4	Stunting	14,5	16	10	8	7	7	8	40	1
5	Peningkatan Produk Dalam Negeri	25	40	10	5	7	7	7	36	3
6	Inflasi	7,04	1,82	10	5	7	7	7	36	3

Sumber : Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023

Untuk RB Tematik tema yang diambil bisa lebih dari satu, sesuai dengan kondisi eksisting dan target yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Kampar. Merujuk pada table di atas, maka terdapat 2 tema yang dapat diambil yaitu kemiskinan dan stunting.

### 3.3.2. Identifikasi Masalah (*Bottleneck*)

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan disaat telah menentukan tema, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengidentifikasi dan mengurai akar masalah yang berkaitan dengan tata kelola pada isu/program prioritas pemerintah. Banyak sekali ditemukan kebijakan yang dibuat tidak menyentuh secara langsung akar permasalahan, sehingga identifikasi permasalahan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini kerap mengakibatkan permasalahan yang sama terjadi lagi dari tahun ke tahun karena tidak terselesaikan dengan baik. Selanjutnya perlu menatap fokus intervensi setelah melakukan identifikasi masalah. Fokus intervensi merupakan aspek yang akan mendapatkan intervensi dalam kegiatan RB Tematik. Dasar untuk menentukan fokus intervensi adalah dari hasil dari identifikasi permasalahan yang dianggap memiliki skala potensi paling tinggi.

Berbagai macam metode mulai dari *fishbone analysis*, metode *critical success factor*, *matrix action priority*, hingga berbagai metode lainnya dapat diterapkan dalam penetapan fokus intervensi. Matriks Eisenhower menjadi salah satu contoh metode lainnya yang dapat diterapkan. Matriks ini dapat

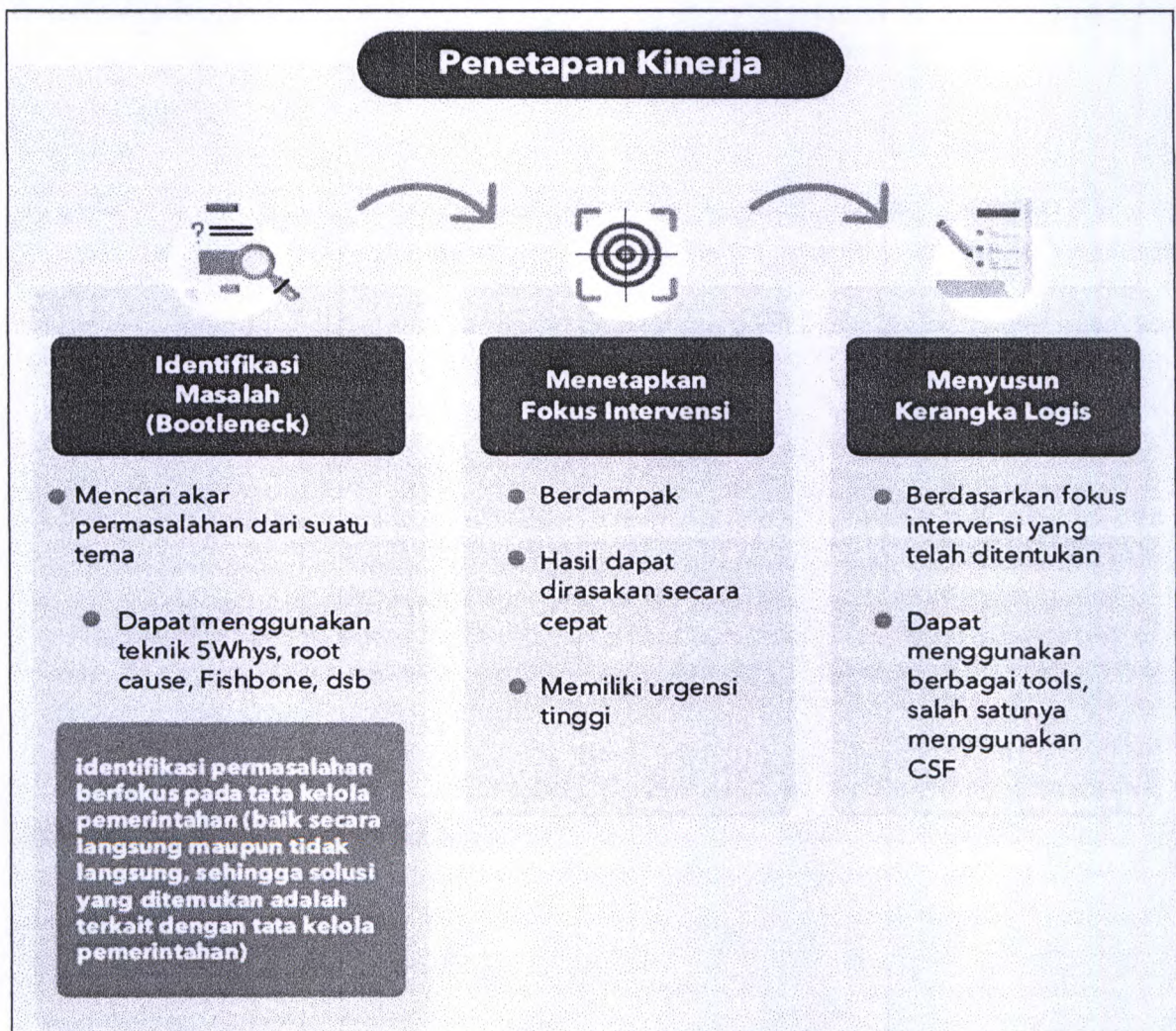
membantu mengatur dan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi (*urgency*) dan kepentingan (*importance*).

Berikut ini adalah ciri-ciri yang harus dimiliki oleh Fokus intervensi:

1. Berdampak, penetapan fokus intervensi merupakan pilihan yang paling berdampak baik pada keseluruhan proses bisnis maupun pada masyarakat secara langsung.
2. Hasil dapat dirasakan secara cepat.
3. Memiliki urgensi tinggi, penetapan fokus intervensi adalah yang paling memiliki urgensi tinggi dan perlu untuk segera diintervensi. Sebagaimana pemilihan tema, maka pemilihan fokus intervensi harus merupakan alternative pilihan yang apabila tidak segera dilaksanakan akan memberikan dampak negatif.

### 3.3.3. Penetapan Kinerja / *Log Frame*

Langkah selanjutnya dalam kerangka perencanaan reformasi birokrasi tematik, instansi pemerintah perlu menyusun kerangka logis berdasarkan fokus intervensi yang telah ditetapkan.



Gambar 3.6 Penetapan Kinerja

Sumber : Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro

#### 3.3.4. Penyusunan Rencana Aksi

Setelah organisasi pemerintah memiliki kerangka kerja logis untuk kinerjanya, langkah selanjutnya adalah menetapkan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan masalah utama, tindakan utama yang harus dilakukan adalah dengan membuat rencana tindakan yang didasarkan pada rangka kerja logis yang telah ditetapkan pada tahapan sebelumnya. Rencana ini mencakup rumusan output, indikator, dan target waktu penyelesaian. Selain itu, harus ditetapkan organisasi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan setiap rencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana aksi penting karena akan memecah proses mencapai tujuan menjadi tugas-tugas yang dapat dilakukan. Rencana aksi ini akan membuat lebih jelas siapa yang mengerjakan apa dan kapan selesai. Penyusunan dilakukan oleh koordinator program tematik bersama dengan instansi yang relevan. Gambar format rencana aksi RB Tematik menunjukkan cakupan atas permasalahan, aksi perbaikan, output, indikator, target waktu penyelesaian, instansi yang bertanggung jawab sebagai koordinator, dan pelaksana aksi perbaikan.

Tabel 3.17. Form Renaksi RB Tematik Kabupaten Kampar

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator	Pelaksana
Kemiskinan BPBD															
Belum tersedianya dokumen yang legas terkait data potensi bencana dan desa serta peta rawan bencana	Dokumen KRB yang legal	Rencana penanggulan bencana yang akurat dan tepat sasaran	Masyarakat rawan bencana di Kabupaten Kampar	Dokumen KRB yang legal	Rencana penanggulan bencana yang akurat dan tepat sasaran	Masyarakat rawan bencana di Kabupaten Kampar	0	0	1	0	1	Rp 484.048.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi terkait komunikasi informasi dan edukasi terkait bencana alam	Menciptakan masyarakat yang tanggap terhadap bencana alam	Sosialisasi KIE kepada Masyarakat Kabupaten Kampar	Masyarakat rawan bencana di Kabupaten Kampar	Menciptakan masyarakat yang tanggap tangkas dan tangguh terhadap bencana alam	Sosialisasi KIE kepada Masyarakat Kabupaten Kampar	Masyarakat rawan bencana di Kabupaten Kampar	0	11	11	0	22	Rp 236.784.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Belum maksimalnya pengetahuan warga	Jumlah warga negara dan aparatur	Relawan yang tanggap tangkas dan	Masyarakat dan aparatur yang tinggal di	Jumlah warga negara dan aparatur	Relawan yang tanggap tangkas dan	Masyarakat dan aparatur yang tinggal di	40	40	0	0	80	Rp 212.563.200	Badan Penanggulangan Bencana		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
negara dan aparaturnya terkait pencegahan dan mitigasi di kawasan rawan bencana	r yang mengikutipelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	tangguh	kawasan rawan bencana	yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	tangguh	kawasan rawan bencana									Daerah	
Perlunya korban bencana mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terdistribusikan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Kampar	Korban bencana di Kabupaten Kampar yang mendapatkan logistik	Warga Kabupaten Kampar korban bencana	Terdistribusikan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Kampar	Korban bencana di Kabupaten Kampar yang mendapatkan logistik	Warga Kabupaten Kampar korban bencana	62	62	63	63	250	Terkait	Rp 255.567.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Adanya warga negara yang mendapatkan musibah yang perlu dilakukan	Tersedia tenaga dan fasilitas untuk mencari	Tenaga dan fasilitas pencarian, pertolongan dan evakuasi	Masyarakat yang mendapatkan musibah yang perlu pencarian	Tersedia tenaga dan fasilitas untuk pencarian,	Tenaga dan fasilitas pencarian, pertolongan dan evakuasi	Masyarakat yang mendapatkan musibah yang perlu pencarian dan	62	62	63	63	250	Terkait	Rp 238.256.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
pencarian, pertolongan dan evakuasi	pertolongan dan evakuasi terhadap masyarakat yang mendapat musibah		pertolongan dan evakuasi	pertolongan dan evakuasi terhadap masyarakat yang mendapat musibah												
DINAS PERIKANAN																
Kurangnya modal dan Tingginya Operasional Usaha di Sektor Perikanan	Peningkatan Produksi Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi dan kesejahteraan Pelaku Usaha di Sektor Perikanan	Pelaku Usaha Sektor Perikanan	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		KUB	5	10	5	5	25	Terkait	Rp 70.648.000		Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	
				Pengembangan Kapasitas Pembudi		Kelompok	0	25	20	5	50	Terkait	Rp 3.397.671.800		Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				daya Ikan Kecil										Koordinator Kampar	Pelaksana
				Pemberian Pemandangan, Kemandanaan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Mengikuti Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0	2	2	1	5	Terkait	Rp 103.521.000	Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	
				Penyediaan Prasarana Pembudi	Unit	Jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR) yang	2	2	4	0	8	Terkait	Rp 1.021.012.500	Dinas Perikanan Kabupaten	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				dayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	disediakan Sarana Prasarana									Kampar	
				Penjanaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit Penyediaan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan (	0	1	1	1	3		Terkait	Rp 497.356.000	Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	
<b>DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>															
Masih tingginya angka petani miskin	Menurunnya angka petani miskin	Petani/masyarakat	Angka petani miskin mengalami penurunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknolo	Pengadaan alat mesin pertanian (Filter Hidraulik iseki)	Jumlah Unit	1	1	1	1		Unit	Rp 269.887.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				gi dan Spesifik Lokasi											
					Pengadaan alat mesin pertanian (Mata Pisau Rotary iseki)	Jumlah Unit	1					Set		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Bantuan Saprodi Komoditi Cabe ( Pupuk, Benih Cabe, Herbisida dan Insektisida)	Jumlah Bantuan Saprodi Komoditi cabe	5					Ha	Rp 1.024.818.930	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Pengendalian Pengunaan Sarana Pendukung Pertanian Pengendalian Organisme Pangan Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Asuransi usaha Tani Padi (AUTP)	Jumlah luas lahan petani padi	250	250	250	250	1000	Ha	Rp 865.038.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Perkebunan											
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	PELATIHAN TEMATIK, SOSIALISASI PENGUKURAN GEOSPASIAL	Jenis PELATIHAN TEMATIK, SOSIALISASI PENGUKURAN GEOSPASIAL	5	6	10		21	BPP	Rp 973.585.500	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan Jaringan Irigasi (Pertanian)	Jumlah Volume Jaringan Irigasi				200		M	Rp 437.155.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha tani	Jumlah Volume Pembangunan Jalan Usaha tani		233	214		447	M3	Rp 929.207.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Pembangunan	Belanja	Jumlah		5			5	Unit	Rp	Dinas	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				gunakan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Hibah kemasyarakatan alat mesin Pertanian	volume alat mesin pertanian (cultivator)							451.331.000	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
						Jumlah volume alat mesin pertanian (HAND TRAKTOR)		4		4	unit			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
<b>DINAS SOSIAL</b>															
Masih Rendahnya Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Kampar yang Menangani PPKS	Penda mping Sosial / Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Berdayakan	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Berdayakan	57 Orang PSM	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM dan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)		57	57	57	57	4	561.473.500	Dinas Sosial	
Masih	Lembag	Jumlah	4	Peningkatan/Kota	Peningkatan	Meningkatn		4	4	4	4	4	Rp	Dinas	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Rendahnya Jumlah Lembaga Sosial yang Menangani Permasalahan PPKS di Kabupaten Kampar	a Sosial yang Menangani Permasalahan Sosial	Lembaga Sosial yang Menangani Permasalahan Sosial	Lembaga Sosial	atan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	n Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	ya Jumlah Lembaga Sosial yang Menangani PPKS di Kabupaten Kampar							1.356.325.750	Sosial	
Masih Banyaknya Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar yang membutuhkan Alat Bantu Gerak	Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Alat Bantu Gerak	23 Orang Penyandang Disabilitas	Penyediaan Alat Bantu	Tersedia Peralatan alat Bantu Gerak bagi Penyandang Disabilitas dan Ekstrauma di Kabupaten Kampar		23						Rp 353.109.000	Dinas Sosial	
Masih Banyaknya ODGJ dan Orang Terlantar di Kabupaten	ODGJ, Orang Terlantar, Mayat Terlantar	Jumlah ODGJ, Orang Terlantar, Mayat Terlantar,	100 Orang	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kegiatan dan Penanganan Sosial Terkait dengan	25	25	25	25	100	Terkait dengan Masyarakat	Rp 361.787.400	Dinas Sosial	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
Kampar	ar, Gepeng, Pengemis, Gelandangan, Warga, Pengemis, Binaan, Napza dan PMKS Lainnya	Gepeng, Pengemis, Gelandangan, Warga, Binaan, Napza dan PMKS Lainnya														
Masih kurang tempat penampungan pengungsi	Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang tersedia	0	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Tersedia	0	0	0	0	0		Rp -	Dinas Sosial		
Belum adanya Psikolog Khusus untuk Penanganan	Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan	100 Orang	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana	25	25	25	25	100	Terkait Langsung dengan Masyarakat	Rp 90.961.000	Dinas Sosial		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana			
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana		
n Bencana		Pelayanan Dukungan Psikososial															
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar																	
Masih tingginya angka petani miskin	Menurunnya angka petani miskin	Angka Petani Miskin	Angka Petani Miskin pada tahun 2023 mengalami penurunan	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumber nya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pemberian Bantuan Bibit Ayam dan Itik untuk Kelompok Tani	Jumlah Bibit Ayam dan Itik yang disalurkan	0	0	0	750	0	7500	0	Rp 601.000.000	Terkait	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar	
				Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Pembangunan jalan produksi perkebunan untuk Kelompok Tani	Jumlah Jalan Produksi Perkebunan yang dibangun	0	8	8	0	0	16	0	Rp 2.904.500.000	Terkait	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar	
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK																	
Masih rendahnya kualitas	Peningkatan kualitas	Jumlah UMK yang ditingkatka	30 pelaku umk	Pemberdayaan Melalui	UMK	Terlaksananya Pelatihan	30					30		Rp 299.251.200	tidak terkait langsung	Dinas Perdagangan,	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Produk UMK	Sasaran produk UMK	n Kualitas produknya		Kemitraan Usaha Mikro										Koperasi dan UMK	
Masih banyak permasalahan-an-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha	Peningkatan daya saing usaha dan kualitas produk UMK	Jumlah UMK yang mendapat Layanan PLUT KUMKM	Pelaku UMK di Kecamatan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Penguatan Usaha Mikro	Kecamatan	Jumlah UMK yang mendapat Layanan konsultasi dan Pendampingan Usaha,fasilitasi pendafrtan izin usaha serta sertifikasi dan standarisasi serta pengembangan kemasan produk	5	5	5	6	21	tidak terkait langsung dengan masyarakat secara umum tetapi dengan pelaku usaha	Rp 154.850.550	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
Belum adanya	Tersedia	Jumlah dokumen	Masyarakat	Identifikasi	1 Dokumen	Jumlah dokumen	0	0	1	0	1		Rp 162.199.65	Dinas Peruma	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
basis data tentang rumah yang berada dilokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	basis data tentang rumah yang berada dilokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	data rumah dilokasi Rawan Bencana dan lokasi yang berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota		Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota									0	han Rakyat dan Kawasan Perumahan	
Masih adanya kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab. Kota yang belum ditangani	Meningkatkan lingkungan sehat kawasan pemukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (dibawah 10 Ha)	Masyarakat berada dikawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembinaan dan Pengembangan Kawasan	1 Dokumen	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tersusun dan/atau tereview							Rp 266.885.950	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator	Pelaksana
				Perman dan Perumahan Kumuh		serta terlegalisasi									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Kawasa n Perumahan dan Perumahan Kumuh	50 Laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	10	20	10	10	50	Rp 41.670.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasa n Perumahan		
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering	3 Dokumen	Jumlah rencana tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan /Pemugaran	0	0	3	0	3	Rp 167.651.800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasa n Perumahan		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Masih rendahnya cakupan layanan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	Meningkatnya penataan prasarana, sarana dan utilitas umum	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan	Masyarakat	Design (DED) Perumahan/Pemukiman Perumahan Kumuh Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan	0	0	1	0	0	1	Rp 175.389.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Masih	Meningkatnya penataan prasarana, sarana dan utilitas umum	Jumlah Lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	Masyarakat	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	124 Paket	Jumlah Lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	0	40	70	14	124		Rp 20.422.642.573	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Masih	Meningkatnya penataan prasarana, sarana dan utilitas umum	Jumlah	Masyarakat	Perbaikan	546 Unit	Jumlah	0	230	316	0	546		Rp	Dinas	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
tinggi Backlog rumah	katnya lingkungan sehat kawasa n pemuki man	rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkemban gnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh	at Berpengh asilan Rendah (MBR) / Miskin	n Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencega han Terhada p Tumbuh dan Berkem bangnya Permuki man Kumuh Diluar Kawasa n Permuki man Kumuh Dengan Luas Dibawa h 10 (Sepulu h) Ha									19.277.154 .500	Peruma han Rakyat dan Kawasa n Permuk iman		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Belum Memadainya Pemenuhan	Tersediaanya dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Rawa yang	2 DOK	Penyusu nan Rencana Teknis	8 Dokumen	Jumlah dokumen Dokumen Lingkungan		2	6	8	Tidak Terkait Langsung	Rp 320.474.00 0	Dinas Pekerjaan Umum			

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Kebutuhan Air Untuk lahan Pertanian	rencana teknis irigasi dan rawa	Tersusun Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa									dan Penataan Ruang	
Belum Memadainya Pemenuhan Kebutuhan Air Untuk lahan Pertanian	Meningkatnya Kondisi Salura Irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	Rehabilitasi Bendung Irigasi	1 Unit Bendung Irigasi				1	1		Terkait Langsung	Rp 4.072.830.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Belum terpenuhinya Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air baku dan limbah untuk mencegah stunting	Meningkatnya Pelayanan dasar Pemanfaatan Kebutuhan Air Baku dan Air Limbah	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	50 Liter/Detik	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	SR (Sambungan Rumah)						Terkait langsung dengan masyarakat	Rp 328.080.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Belum	Meningkatnya	Jumlah	250 SR	Pembangunan	Jumlah	SR						Terkait	Rp	Dinas	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
terpenuhi ya Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air baku dan air limbah untuk mencegah stunting	katnya Pelayan dasar Pemen uhan Kebutu han Air Baku dan Air Limbah	sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPA M Berbasis Masyarakat		gunan SPAM Jaringa n Perpipaa n di Kawasa n Perdesa an	(Sambunga n Rumah)	sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPA M Berbasis Masyarakat							3.168.690. 000	Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang		
Belum terpenuhi ya Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air baku dan air limbah untuk mencegah stunting	Mening katnya Pelayan an dasar Pemen uhan Kebutu han Air Baku dan Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambun g dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	500 Rumah Tangga	Pemban gunan/ Penyedi aan Sistem Pengelol aan Air Limbah Terpusa t Skala Kota	RT (Rumah Terlayani)	Terlaksana nya Pembangun an Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Permukima n Kumuh, Pencegahan Stunting dan Penanggula ngan Kemiskinan di Kab. Kampar				0	0	250	103	353	Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang	
<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Angkut</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Unit</b>	<b>Penyedi</b>	<b>Unit</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Penyediaan</b>	<b>Rp</b>	<b>Dinas</b>	<b>Dinas</b>	<b>Perhub</b>	
Distribusi pasokan	Angkut	Jumlah Angkutan	Unit	Penyedi aan	Unit	Jumlah Angkutan	Rp 28.	Rp 50.0	Rp 22.	-	Rp 50.0	Rp 50.000.000	Dinas Perhub	Dinas Perhub		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator
pangan	Umum untuk Jasa Angkut an Orang dan/atau Barang Antar atau Baran g Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Umum untuk Jasa Angkut an Orang dan/atau Baran g Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		Angkuta n Umum untuk Jasa Angkut an Orang dan/atau Baran g Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Tersedia		000 .00 0	000 .00 0	000 .00 0	000 .00 0	00.0 00	Umum untuk Jasa Angkut an Orang dan/atau Baran g Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota			
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa														
Kemiskinan Rendahnya pemberday aan lembaga ekonomi di desa	Peningkatan ekonomi di desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	1 Dokumen	Fasilitas i Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	Dokumen		Rp 75.596 .90 0	Rp 6.31 0.00 0		Rp 81.9 06.9 00	Tidak terkait langsung	Rp 81.906.900		
	Peningkatan ekonomi di desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberday aan BUM Desa dan	1 Dokumen	Pembinaan Pengelola BUMDes	Dokumen		Rp 10.500 .00 0	Rp 51.5 80.0 00		Rp 117. 205. 000	Tidak terkait langsung	Rp 117.205.00 0		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
		Lembaga Kerja Sama antar Desa													
	Peningkatan ekonomi di desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	Fasilitas Pengembangan Usahan Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan PAD	Dokumen	Peningkatan PADEs	Rp 7.194.900	Rp 68.149.000	Rp 58.305.000	Rp 8.520.000	Rp 142.168.900	Tidak terkait langsung	Rp 142.168.900		
Belum optimalnya pengelolaan Keuangan Desa yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 53.375.000	Rp 2.077.831.000	Rp 57.555.000	Rp 2.060.007.000	Rp 4.248.768.000	Tidak terkait langsung	Rp 4.248.768.000		
Masih rendahnya prevalensi stunting	Peningkatan Pembinaan Posyandu Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayaguan	3 Dokumen	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan	Dokumen	Penurunan Jumlah Balita Stunting	Rp 12.547.000	Rp 16.320.000	Rp 10.340.000	Rp 10.634.700	Rp 49.841.700	Terkait Langsung	Rp 49.841.700		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator	Pelaksana
		naan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		pendaya gunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat											
Masih rendahnya kompetensi KPM dalam pelaporan	Pembinaan Kader Pembinaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Lembaga	Peningkatan Kapasitas KPM	Lembaga	Peningkatan pelaporan e_Hdw	Rp 72.987.800	Rp 6.900.000	Rp 12.092.200	-	Rp 91.980.000	Terkait Langsung	Rp 91.980.000		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
		Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya													
Rendahnya kualitas pendidikan warga miskin	...	...	....												
				Penambahan Ruang Kelas Baru	6	Sekolah	1	1	1	3	6	Terkait langsung	1.599.360.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, PUPR, PMD....
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah /Tu	4	Sekolah					4		705.416.000	Dinas Pendidikan	
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	9	Sekolah					9		626.769.000	Dinas Pendidikan	
				Pembangunan Perpustakaan	2	Sekolah					2		349.124.000	Dinas Pendidikan	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
				Sekolah												
				Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	178	Sekolah						178	24.337.198.000	Dinas Pendidikan		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	32	Sekolah						32	8.021.167.000	Dinas Pendidikan		
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	2	Sekolah						2	191.730.000	Dinas Pendidikan		
				Pengadaan Mebel Sekolah	34	Sekolah						34	2.345.659.000	Dinas Pendidikan		
				Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga	132	Set						132	1.539.500.000	Dinas Pendidikan		
				Penyeleenggaraan Proses Belajar Dan	17592	Peserta Didik						17592	192.459.050	Dinas Pendidikan		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator	Pelaksana
				Ujian Bagi Peserta Didik											
				Penyiapan Dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	97	Satuan Pendidikan					97	467.914.400	Dinas Pendidikan		
				Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	240	Siswa					240	282.276.350	Dinas Pendidikan		
				Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6600	Pendidik dan Tenaga Kependidikan					6600	24.878.816.761	Dinas Pendidikan		
				Pembinaan	495	Satuan Pendidikan					495	152.239.750	Dinas Pendidikan		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah									0		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	475	Satuan Pendidik							130.388.600.000	Dinas Pendidikan	
				Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	486	Orang							57.342.000	Dinas Pendidikan	
Tingginya jumlah rumah tidak layak huni	Rumah Tidak layak	5000													
Pengurangan kantong kemiskinan	akses PSU														
Stunting															
<b>DINAS KESEHATAN</b>														DINAS	DINAS
anggaran	19411	Ibu hamil	19411	Persenta	Ibu Hamil	Jumlah Ibu	558	558	558	588	1941	Terkait			

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
belum memenuhi dalam pelaksanaan kegiatan		Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi		se Ibu Hamil KEK (yang memiliki lingkaran lengan atas kurang dari 23,5 cm) yang mendapatkan tambahan asupan gizi terhadap seluruh Ibu Hamil KEK		Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							3.190.673.000	KESEHATAN	KESEHATAN
anggaran belum memenuhi dalam pelaksanaan kegiatan	16352	Bayi usia 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	16352	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar anak	Bayi	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2044	2044	2044	2044	16352	Terkait	17.385.950	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
anggaran	66485	Anak	66485		Balita	Jumlah	664	6648	664	6648	6648	Terkait		DINAS	DINAS

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
belum memenuhi dalam pelaksanaan kegiatan		berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya		berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya terhadap seluruh balita		Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85	85	5	85	5	1.114.696.000	KESEHATAN	KESEHATAN	
banyak pelaporan aplikasi kegiatan yg diinput petugas desa	31	Persentase kabupaten/kota yang mengimple mentasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	31	peningkatan tatalaksana gizi yang bermasalah dan pelaporan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	31	31	31	31	31	1.138.560.850	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator
Banyaknya Pasangan Usia Subur masih berstatus Penyandang masalah kesejahteraan sosial	Desa/Kelurahan	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	35000	Pengelolaan Data Cakupan kabupaten	Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.750	8.750	8.750	8.750	35000	1.017.450.700	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
Belum optimalnya pengetahuan Pendamping Program Keluarga (PKH) tentang kesehatan dan gizi	Desa/Kelurahan	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	115	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30	30	25	115	1.017.450.700	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>														
Kurangnya Anggaran dalam	KPM	Persentase desa/kelurahan yang	242	Peningkatan Kapasitas	KPM	Jumlah Kader Pembangun	242			242	242	91.980.000	DINAS PEMBERDAYAAN	DINAS PEMBERDAYAAN

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator	Pelaksana
peningkatan kapasitas KPM		kader pembangunan manusia yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		<p>1. Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>									AN MASYARAKAT DESA	MASYARAKAT DESA	
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>															
Sumber daya manusia atau pengetahuan tentang bertani masih	Kelompok Wanita Tani	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya	20	<p>1. Bayam 2. Benih Cabe Rawit 3. Benih Mentimun</p>	Kelompok Wanita Tani	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia				21 (Lokus Sunting)	20	Terkait	1.467.490.824	DINAS KETAHANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
rendah, ketersediaan lahan dan kurangnya dana untuk penanganan stunting		pekarangan untuk peningkatan asupan gizi		4. Kangkuning 5. Polybag Hitam 6. Terong	Tersedia Rumah Bibit dan Fasilitas Pendukung Lainnya										
<b>DINAS KOMINFO</b>															
Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan	21 Desa lokus Stunting	Terlaksananya Kampanye nasional pencegahan Stunting	12	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen		3	3	3	3	12	560.566.350	DINAS KOMINFO	DINAS KOMINFO
<b>DPPKBP3A</b>															
Masih adanya pengetahuan masyarakat tentang gender yang sama dengan perempuan	Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan pemberdayaan perempuan		Advokasi Kebijakan dan Peningkatan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan pemberdayaan perempuan	Desa/Kelurahan		0	8	0	0	8	Rp 60.093.900	DPPKB P3A	DPPKB P3A

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Belum maksimalnya pengelolaan Rumah data kependudukan dan belum terbentuknya Grand Design Kependudukan di Kabupaten Kmapar	Desa/Kelurahan	Persentase Jumlah Rumah Data Kependudukan di Desa/Kelurahan Kampung Berkeualitas	134	uan Kewenangan Kabupaten/Kota Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	Laporan	Jumlah Laporan pengelolaan Rumah Data Kependudukan	10	44	54	26	134	Terkait	Rp 110.577.350	DPPKB P3A	DPPKBP3 A
		Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	2	Pengelolaan Hasil Operasional dan sarana balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan	dokumen	Jumlah Laporan hasil Pengelolan Hasil Operasional dan sarana balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangu					2	Terkait	Rp 747.750.000	DPPKB P3A	DPPKBP3 A

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana					
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana				
				Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	nan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)														
		Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	1	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak					1	Terkait	Rp 1.325.684.000	DPPKB P3A	DPPKBP3 A				
		Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	1	operasional PKB/PL KB yang tersedia	Unit	Jumlah sarana penduduk operasional PKB/PLKB yang tersedia					1	Terkait	Rp 416.478.000	DPPKB P3A	DPPKBP3 A				
Masih belum optimalnya pencatatan dan pelaporan di Fasilitas Kesehatan	Laporan	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	12	Pengendalian Pengindustrian Alkon dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunja	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Pengindustrian Alkon dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan					3	3	3	3	12	Terkait	Rp 122.100.000	DPPKB P3A	DPPKBP3 A

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				ng Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan dan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya										
Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan informasi tentang kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	42	Kesertaan pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	0	42	0	0	42	Terkait	Rp 159.444.050	DPPKB P3A	DPPKBPA
Masih kurangnya sarana pendukung pelayanan KB	Laporan	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	1	sarana Penunjang pelayanan KB	Unit	Jumlah Unit sarana Penunjang pelayanan KB	0	0	0	1	1	Terkait	Rp 102.708.000	DPPKB P3A	DPPKBPA
Masih kurangnya partisipasi PUS untuk	Kecamatan	Persentase Unmet Need pelayanan	3	Tercapainya Peran Kader	OPD	Jumlah Organisasi yang Mendapatk	0	0	0	3	3	Terkait	Rp 33.458.000	DPPKB P3A	DPPKBPA

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator	Pelaksana
menjadi akseptor KB		keluarga berencana		PKK sebagai penggerak untuk meningkatkan kesertaan ber-KB bagi masyarakat		an Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
Belum maksimalnya pelaksanaan program Bangga Kencana di Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Program Bangga Kencana	38	Tercapainya Peran Kadr PKK sebagai penggerak untuk meningkatkan kesertaan ber-KB bagi masyarakat	Kampung KB	Jumlah kampung kb yang mengikutinya pelaksanaan dan pengelolaan program banggacencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9	9	9	11	38	Terkait	Rp 598.000.000	DPPKB P3A	DPPKBPA

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Belum optimalnya promosi dan KIE tentang Program Bangga Kencana	Desa/kelurahan	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	250	PKB/PL KB	Kader	Kampung KB	50	50	100	50	250	Terkait	Rp 932.000.000	DPPKB P3A	DPPKBP3 A
Belum optimalnya Organisasi yang mendapatkan advokasi terkait Bangga Kencana	Organisasi	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	2	Terlaksananya Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KB Manjemen dan KIE	Organisasi	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Keendudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stekholder dan Mitra Kerja	0	2	0	0	2	Terkait	Rp 65.629.100	DPPKB P3A	DPPKBP3 A
Masih adanya masyarakat yang belum	Dokumen	Persentase Unmet Need pelayanan	1	Promosi dan KIE Program Bangga	dokumen	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE	0	0	0	1	1	Terkait	Rp 106.354.250	DPPKB P3A	DPPKBP3 A

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
mendapatkan informasi tentang Program Bangsa Kencana		keluarga berencana		Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepedulian dan Keluarga Berencana) Melalui Media massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang	Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepedulian dan Keluarga Berencana) Melalui Media massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang										
		Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	200	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Jumlah Tenaga Pelayan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayan Keluarga Berencana dan	Orang					200	Terkait	Rp 66.460.800	DPPKB P3A	DPPKBPA

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				an Reproduksi											
		Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	1	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya						1	Rp 52.697.350	DPPKB P3A	DPPKBP3 A
		Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	12	promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Laporan	Jumlah Hasil laporan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja						12	Rp 366.894.050	DPPKB P3A	DPPKBP3 A
		Cakupan keluarga berisiko	53300	pendampingan keluarga	orang	Jumlah Organisasi yang						53300	Rp 3.898.900.000	DPPKB P3A	DPPKBP3 A

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
		stunting yang memperoleh pendampingan		yang beresiko stunting											
Belum optimalnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan gizi	Kelompok	Persentase pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKJR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	1	Pelatihan PIK	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	0	1	0	0	1	Terkait	Rp 209.967.500	DPPKB P3A	DPPKBP3 A

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Masih kurangnya partisipasi keluarga Balita untuk berperan aktif sebagai anggota kelompok Bina Keluarga Balita	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	1	Pelatihan BKB	Laporan	Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	0	1	0	0	1	1	Rp 106.955.000	DPPKB P3A	DPPKB P3A
pendampingan keluarga berisiko stunting (Calon Pengan	keluarga berisiko stunting (Calon Pengan	Cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting	10	Kegiatan pendampingan	bulan	tercapainya pendampingan keluarga berisiko stunting	3	3	3	1	10	pendampingan, bimbingan teknis	3.105.900.000	DPPKB P3A	TPK

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
	tin, ibu hamil, ibu pascasalin, baduta 0-23 bulan, balita 0-59 bulan														
Audit Kasus Stunting	Baduta stunting, ibu hamil KEK dan risiko tinggi	Pelaksanaan audit kasus stunting 2 kali dalam setahun	2	kegiatan audit kasus stunting	kali	Terlaksananya audit kasus	1	1	1		2 kali	Audit kasus, pertemuan persiapan audit kasus stunting	40.000.000	DPPKB P3A	Tim Pakar Audit kasus stunting
Diseminasi Audit Kasus Stunting	TPPS Kab, TPPS Kecamatan, TPPS Desa/Kelurahan, Mitra	Pelaksanaan diseminasi audit kasus stunting 2 kali dalam setahun	2	Diseminasi	kali	Terlaksananya diseminasi audit kasus stunting	1	1	1	2 kali	2 kali	Diseminasi	40.000.000	DPPKB P3A	TPPS Kabupaten
Mini Lokakarya	TPPS Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Minilokakarya	10	Pertemuan	kali	terlaksananya Minilokakarya dan tercapainya RKTL TPPS	3	3	4	10 kali	10 kali	mini lokakarya	273.000.000	DPPKB P3A	TPPS Kecamatan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
BKB Kit Stunting	Desa Lokus stunting	Penyediaan BKB kit stunting	20	pengadaan	set	Kecamatan Terselenggara		20					360.000.000	DPPKB P3A	DPPKB P3A
Koordinasi TPPS	TPPS Kab, TPPS Kecamatan, TPPS Desa/Kelurahan, Mitra Kerja	Pertemuan Koordinasi TPPS	4	Pertemuan	kali	Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam percepatan penurunan stunting	1	2				4 kali	80.000.000	DPPKB P3A	DPPKB P3A
Masih Banyak Masyarakat yang Belum ber-KB	PUS	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	27821	Pengelolaan Hasil Operasional sarana balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	dokumen	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Hasil Operasional dan sarana balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	6955	6955	6956	6956		27821	747.750.000	BKKBN/DINAS KB	BKKBN/DINAS KB

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator
Masih Banyak Masyarakat yang Belum ber-KB	PUS	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	2945	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	736	736	737	2945	Terkait	1.325.684.000	DINAS KB	DINAS KB
Masih banyak Tenaga Pelayanan KB dan KR yang belum tersertifikas i CTU	TENAGA PELAYANAN KB DAN KR	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	52	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	-	-	52	52	Terkait	66.460.800	DINAS KB	DINAS KB
Masih banyaknya PUS yang belum memahami tentang KB Pasca Persalinan	PUS	Persentase Unmetneed KB	63	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan KB Pascasalin dan Pasca Keguguran	-	63	-	63	Terkait	52.697.350	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
dan Pasca Keguguran				Keguguran										DUNGA	
Dinas PU PR															
Banyaknya keluarga beresiko stunting yang belum mendapatkan akses SAM dan SAN namun terbentuk dengan perencanaan dan anggaran	Masaya rakat Resiko Stuntin g, dan Sulit Akses SAM dan SAN	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	60	Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR)	unit	Kapasitas SPAM IKK/Perkot aan atau SPAM Tema tik Tertentu yang terbangun	0	0	0	0	60	Terkait	328.080.000	DINAS PU / CIPTA KARYA	DINAS PU / CIPTA KARYA
Banyaknya keluarga beresiko stunting yang belum mendapatkan akses SAM dan SAN namun terbentuk dengan perencanaan dan anggaran	Masaya rakat Resiko Stuntin g, dan Sulit Akses SAM dan SAN	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	400	Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (SPAM BM)	SR	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	0	0	200	200	400	Terkait	3.168.690.000	DINAS PU / CIPTA KARYA	DINAS PU / CIPTA KARYA
Banyaknya keluarga beresiko stunting yang belum mendapatkan akses SAM dan SAN namun terbentuk dengan perencanaan dan anggaran	Masaya rakat	Rumah tangga	374	Pembangunan	unit	Jumlah Rumah	0	0	250	103	374	Terkait	3.519.205.	DINAS PU /	DINAS PU /

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
beresiko stunting yang belum mendapatkan akses SAM dan SAN namun terbentur dengan perencanaan dan anggaran	Resiko Stunting, dan Sulit Akses SAM dan SAN	yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak		Tangki Septik Individual								000	CIPTA KARYA	CIPTA KARYA	
<b>Dinas Pertanian</b>															
Banyaknya keluarga beresiko stunting yang belum mengkonsumsi bahan pangan dengan gizi seimbang	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di 5 kecamatan lokus stunting g. Tiap kecamatan 1 unit kegiatan n.	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	5	Pembangunan Rumah Benih P2L, Pengembangan demplot, pertanaman dan kegiatan pasca panen	Unit	Jumlah Rumah Benih P2L, Pengembangan demplot, pertanaman dan kegiatan pasca panen	1	1	1	2	5	1.024.818.930	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	
Investasi	Pelaku Usaha	Pelaksanaan Bimtek	5	Sinkronisasi Pembinaan	5	Bimtek	0	1	1	3	5	283.915.000	Dinas PMPTSP		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
				Penanaman Modal												
		Pengawasan	197	Kegiatan Usaha	197	Pengawasan	0	44	44	109	197		73.949.950	Dinas PMPTS P		
		Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya					0	1	3	4	8		28.135.050	Dinas PMPTS P		
			8	Kegiatan Usaha	8	Pembinaan										
Digitalisasi Pemerintahan	Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Transformasi Digital	30%	Peningkatan Jaringan Internet dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mbps	Jumlah Bandwith	0,25	0,25	0,25	0,25	1	Terkait Langsung	Rp 600.000.000			Kominf o
			50%	Peningkasan	Desa dan	sosialisasi	0	0,3	0,7	0	1	Terkait	Rp			Kominf

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				aatan SDM dibidang Teknologi	Kelurahan	website dan digitalisasi							198.487.000	o	
			50%	jaminan Keamanan digital	Giga Byte	Hardware dan Software Firewall	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Tidak Tersedia Anggaran		Kominf o	
Inflasi	Terkenalnya Inflasi di Daerah	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kelompok Wanita Tani (KWT)	Memberikan bantuan Benih Sayuran & Perlengkapannya (bayam, cabe merah, rawit, jagung manis, kangkung, jagung, kacang panjang, kangkung, panya, terong) kepada	240 Orang (8 KWT X 30 orang)	Terealisasi bantuan benih sayuran dan perlengkapannya kepada KWT	0	240	0	0	240	501.995.616,00		Dinas Ketahanan Pangan	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
				Kelompok Wanita Tani (KWT)												
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok Wanita Tani (KWT)	Memberikan bantuan Ayam Kube, Ayam Dara, Wadah Minum, Wadah Pakan, Stater, Pakan Gower kepada KWT	12 KWT X 30 orang = 360 orang	Terealisasi bantuan ternak ayam dan perlengkapan lainnya kepada KWT	0	360	0	0	0	360	492.302.260,00		Dinas Ketahanan Pangan	
		Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Pasar Kecamatan	Menyediakan Data Harga Kebutuhan Pokok Hariannya dan Barang Penting Lainnya	240 HARI (5 hari x 4 minggu x 12 bulan)	Tersedianya Data Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya secara harian	60	60	60	60	240	21.796.850		Dinas Koperasi		

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Masyarakat pada 5 Kecamatan	Melaksanakan Operasi Pasar Reguler bekerjasama dengan Bulog	5 Kecamatan	Terlaksananya pasar secara reguler	5	0	0	0	5		22.381.100	Dinas Koperasi	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kelompok Masyarakat	Memberikan bantuan Sampan, Mesin, Tempel, Sampan Dayung, Jaring Insang Dangkal	250 orang (21 x12 KLP)	Terealisasi bantuan prasarana usaha perikanan tangkap	0	0	250	0	250		1.664.250.000,00	Dinas Perikanan	
		Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan	memberikan bantuan instalasi budidaya cacing sutra, Induk gurami, Baung, Lele, Nila, Patin, Pakan	90 orang (9 KLPx10 orang)	Terealisasi bantuan prasarana bagi pembudidayaan ikan	0	0	90	0	90		557.462.500,00	Dinas Perikanan	
				Memberikan	790 orang	Pengembangan	0	0	790	0	790			Dinas	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
		gan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidayaa Ikan	kan bantuan Benih Ikan Patin, Lela, Gurami +Pakan+ 2 Mesin Pakan	(50x16 KLP)	gan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil							2.550.545.000,00	Perikanan	
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B	Petani Padi	Meningkatkan Produksi i Padi	500 Ha	Terlaksananya Pengembangan Padi	0	500	0	0	500		1.087.900.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Petani Cabai	Meningkatkan Produksi i Cabe Merah	5 Ha	Terlaksananya Pengembangan Cabai	0	5	0	0	5		120.000.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortiku	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator	Pelaksana
Peningkatan Produk Dalam Negeri															
Peningkatan Produk Dalam Negeri	Seluruh OPD	Tercapainya realisasi PDN	Terpenuhinya PDN sebesar 40 %	Penguatan SDM	18	Orang	0	0	5	13	18	Rp 324.250.000	Asisten Ekonomi dan Pembanguan	Bagian PBJ	

Sumber : Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023

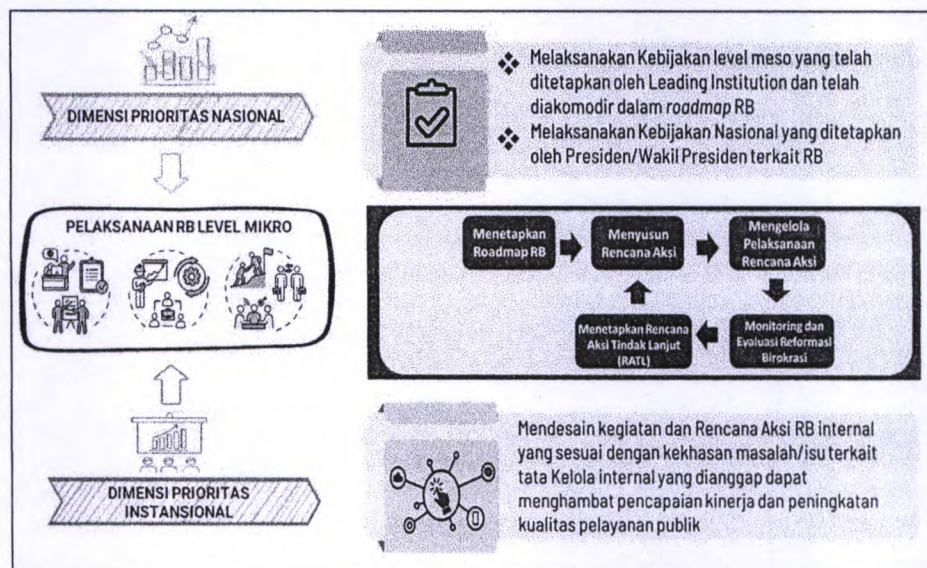
## BAB IV

### MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

#### 4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

##### 4.1.1. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dimensi Prioritas Nasional dan Dimensi Prioritas Instansional menjadi dasar dalam pelaksanaan RB mikro sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4.1. Pelaksanaan yang didasarkan pada dimensi Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan makro dan meso yang bersifat wajib. Pelaksanaan yang didasarkan pada dimensi Prioritas Instansional berarti pelaksanaan RB harus sesuai dan selaras dengan kebijakan nasional terkait tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dipantau dan dievaluasi.



Gambar 4.1. Pelaksanaan RB Level Mikro

Sumber: PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:

##### 1. Menetapkan Road Map RB

Tahapan yang paling utama dan menjadi penentu arah pelaksanaan RB setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yaitu pada tahapan menetapkan Road Map RB ini. Setidaknya ada beberapa poin yang perlu ditetapkan dalam Road Map RB

kementerian/lembaga/pemerintah daerah antara lain isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik nasional maupun instansional, capaian RB instansional, tujuan dan sasaran strategis RB instansional, strategi dan program RB instansional baik general maupun tematik, serta manajemen/pengelolaan RB instansional.

Setelah penajaman dilakukan maka perlu menyesuaikan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang telah memiliki Road Map RB. Selanjutnya, perlu dilakukan pula penyelarasan Road Map RB dengan rencana jangka menengah (RPJM/Renstra) agar kebijakan dalam Road Map RB dapat dilaksanakan dan menjamin kebijakan yang ditetapkan dalam Road Map RB mendapatkan alokasi pembiayaan.

## 2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB

Tahapan ini dilakukan dengan tujuan mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map RB instansi. Rencana aksi setidaknya harus berisi tentang rincian kegiatan, indikator output dari rincian kegiatan, target, waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab program.

## 3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi

Pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi menjadi hal yang dilakukan pada tahap ini. Secara berkala tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring setelah rencana aksi disusun dan penetapan penanggung jawab kegiatan. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut.

## 4. Monitoring dan Evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk beberapa tujuan. Pertama, mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB agar dapat memantau keberhasilan pelaksanaan RB. Kedua, menilai keberhasilan/ efektivitas rencana aksi. Ketiga, menilai kualitas

pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara internal oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan.

#### 5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)

Tahapan ini akan menjadi masukkan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya sebab ditetapkan berdasarkan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini kementerian/lembaga/pemerintah daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

#### 4.1.2. Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional

Perlu dilakukan pengelolaan yang baik untuk mencapai pelaksanaan RB yang berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah disusun maka perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB. Organisasi pelaksanaan RB sesuai dengan level pelaksanaan kebijakan RB itu sendiri, yaitu makro, meso, dan mikro.

Tabel 4.1 Pelaksana RB Nasional

Level Pelaksanaan	Ruang Lingkup Pelaksanaan Peran	Pelaksana
Makro	Menetapkan strategi dan arah kebijakan RB Nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil RB Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)</li> <li>● Sekretariat Eksekutif KPRBN</li> <li>● Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)</li> </ul>
Meso	Menetapkan kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan level makro, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN)</li> <li>● Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN)</li> <li>● Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (TPKRBN)</li> <li>● Kementerian/lembaga Leading Institution</li> <li>● Kementerian/lembaga <i>Leading Sector</i></li> </ul>

Level Pelaksanaan	Ruang Lingkup Pelaksanaan Peran	Pelaksana
Mikro	Mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro RB agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja	Masing-masing kementerian/lembaga/pem erintah daerah

Sumber : PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023

#### 4.1.2.1 Pelaksana Level Makro

Pelaksanaan RB Nasional pada level makro adalah untuk memastikan RB mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penetapan arah kebijakan RB, penetapan kebijakan prioritas RB, serta penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan RB. Wakil Presiden sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) berhak menetapkan arah kebijakan RB sesuai dengan prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPRBN dibantu oleh Sekretariat Eksekutif KPRBN yang bertugas atas nama Ketua KPRBN untuk mengorkestrasi, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang terkait dengan RB kepada kementerian/lembaga.

1. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) bertugas untuk:
  - a. Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan RB untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. Menetapkan kebijakan dan program strategis pelaksanaan RB;
  - c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan RB yang tidak dapat diselesaikan oleh TRBN; dan
  - d. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Presiden.
2. Sekretariat Eksekutif KPRBN bertugas untuk menyiapkan dukungan administrasi, teknis dan substansi kepada ketua KPRBN.

3. Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) bertugas untuk:
  - a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional RB Nasional;
  - b. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan RB Nasional;
  - c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program RB;
  - d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); dan
  - e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan RB Nasional kepada KPRBN.

#### 4.1.2.2. Pelaksana Level Meso

1. Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) sebagai koordinator dalam gabungan Leading Institution bertugas untuk:
  - a. Membantu TRBN dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional RB Nasional;
  - b. Membantu TRBN dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pelaksanaan RB Nasional, baik bersifat makro, meso maupun mikro;
  - c. Memantau perkembangan kemajuan pelaksanaan RB Nasional;
  - d. Memberikan saran dan masukan atas hasil evaluasi pelaksanaan RB pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB; dan
  - e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan RB nasional setiap triwulan kepada TRBN.
2. Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) berfungsi memberikan saran dan masukan secara independen kepada TRBN dan KPRBN tentang pelaksanaan RB.
3. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (TPKRBN) merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas TRBN, yang memiliki tugas untuk:
  - a. Memastikan pelaksanaan RB sesuai dengan Grand Design RB Tahun 2010-2025 dan Road Map RB 2020-2024;
  - b. Memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan penjamin kualitas pelaksanaan program RB Nasional kepada KPRBN;

- c. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan RB dan mengusulkan rencana mitigasi risiko;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada beberapa kementerian/lembaga tertentu terhadap pelaksanaan RB; dan
  - e. Perumusan rekomendasi terhadap hasil penjamin kualitas, monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberian rekomendasi kepada komite pengarah.
4. Kementerian/Lembaga yang ditunjuk sebagai *Leading Institution* adalah pihak yang ikut mengawal pelaksanaan RB bertugas untuk merumuskan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, memberikan pembinaan dan pelatihan perumusan kebijakan, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan kepada TRBN.

Tabel 4.2 *Leading Institution* dalam RB

No.	Instansi Pemerintah	Peran
1.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan kebijakan aparatur negara yang berkualitas;</li> <li>• Perumusan kebijakan dan strategi operasional RB Nasional;</li> <li>• Pembinaan dan Pengawasan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan RB nasional;</li> <li>• Perumusan kebijakan kelembagaan dan tata laksana nasional;</li> <li>• Perumusan kebijakan pelayanan publik nasional.</li> </ul>
2.	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan Pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan RB nasional.</li> </ul>
3.	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan mengawasi penganggaran dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan nasional.</li> <li>• Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran.</li> <li>• Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).</li> </ul>
4.	Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi dan kolaborasi perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan nasional.</li> <li>• Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran.</li> </ul>

5.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan layanan internal pemerintah berbasis elektronik yaitu implementasi aplikasi umum SPBE dan pengembangan inovasi internal.</li> <li>• Penguatan kualitas infrastruktur SPBE.</li> <li>• Integrasi layanan publik berbasis elektronik (e-service)</li> </ul>
6.	Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi.</li> <li>• Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
7.	Lembaga Administrasi Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kompetensi ASN sesuai kebutuhan pembangunan nasional.</li> <li>• Peningkatan pelaksanaan Evidence based policy.</li> </ul>
8.	Badan Kepegawaian Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi implementasi kebijakan terkait manajemen ASN.</li> <li>• Pemutakhiran data PNS.</li> </ul>
9.	Badan Pemeriksa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengawal kualitas pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan.</li> </ul>
10.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pengawasan internal pemerintah dan program pembangunan nasional.</li> <li>• Penguatan penerapan manajemen risiko.</li> </ul>
11.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mereview celah-celah korupsi setiap peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Penguatan upaya pencegahan korupsi.</li> </ul>
12.	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pengelolaan arsip digital.</li> </ul>
13.	Lembaga Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.</li> </ul>
14.	Badan Pusat Statistik (BPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan penyelenggaraan data statistik sektoral.</li> </ul>
15.	Komisi Aparatur Sipil Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah</li> </ul>

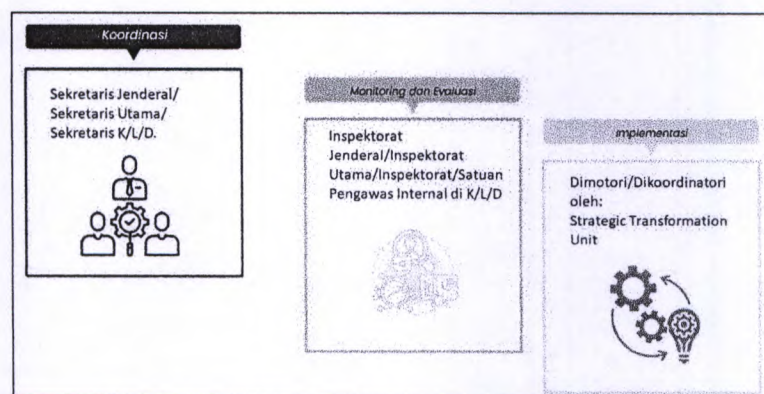
Sumber : PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023

5. Kementerian/Lembaga yang merupakan leading sector yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator secara nasional dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB Tematik.

#### 4.1.2.3. Pelaksana Level Mikro

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah masing-masing. Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (Strategic Transformation Unit (STU)). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan Pengawas Internal di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.



Gambar 4.2. Pelaksana RB Level Mikro

Sumber : PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

1. Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. Melaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

#### 4.1.3. Pengelola Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar

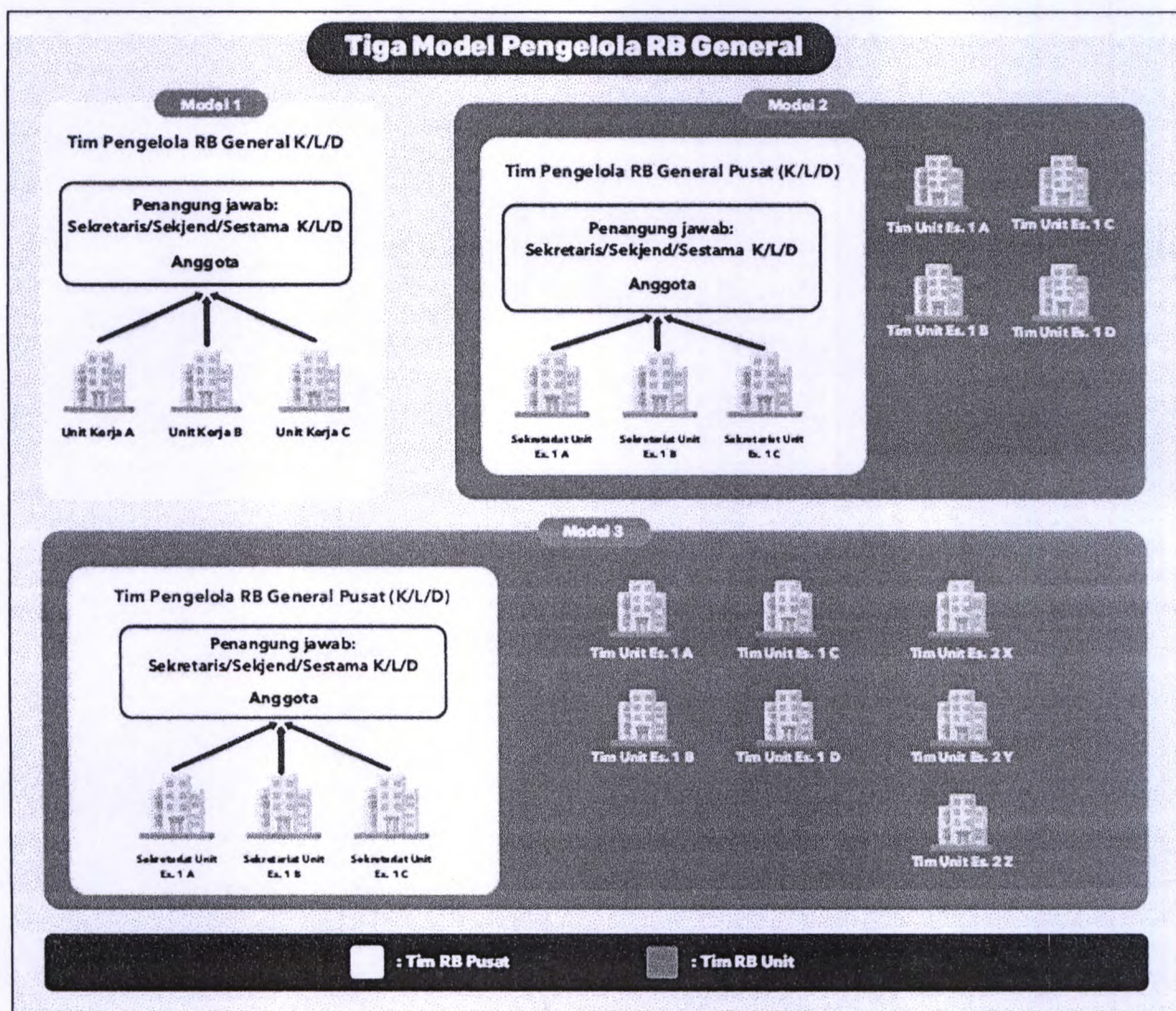
##### 4.1.3.1. Tim Pengelola RB General

Tim Pengelola RB General yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja secara fokus dalam Pembangunan RB. Tim Pengelola RB General dijelaskan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab merupakan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Sekretaris Utama K/L/D
2. Dalam satu K/L/D tim tersebut dapat terdiri dari Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit.
3. Tim bersifat organisasi permanen (STU) atau unit yang memiliki fungsi sama
4. Tim Pengelola RB Pusat adalah pejabat dari unit kerja yang memiliki fungsi dukungan manajemen internal (melaksanakan seluruh Kegiatan Utama mandatory) dan perwakilan unit kerja yang memiliki fungsi kesekretariatan di masing-masing eselon I dan/atau unit kerja level di bawahnya sesuai kebutuhan.

Terdapat tiga model Tim Pengelola RB General, model ini merupakan contoh dan bersifat opsional. Jika K/L/D memiliki model lain yang lebih sesuai dengan kondisi internal dan eksternal K/L/D maka dipersilakan

membentuk Tim tersebut sesuai dengan kebutuhan percepatan pencapaian RB Mikro. Tiga model tersebut dapat dilihat pada matriks perbandingan model pengelolaan berikut ini:



Gambar 4.3. Model Tim Pengelola RB General

Sumber : Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro

Dalam penentuan Model 1, 2 atau 3, K/L/D dapat mengikuti panduan kriteria penetapan model tim pengelola RB K/L sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar 4.4. Penentuan model dipilih berdasarkan tipe kementerian/lembaga/daerah, level pusat, struktur unit vertical, unit mandiri setara eselon II, dan unit vertical di daerah.

<b>Kriteria</b>			
Kriteria	Model 1	Model 2	Model 3
Tipe KL	Kecil	Sedang	Besar
Level Pusat	Setara eselon 1	Setara Menteri/ Kepala Lembaga	Setara Menteri/ Kepala Lembaga
Struktur unit vertikal	2 level	2 level	3 level
Unit mandiri setara eselon II	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Unit vertikal di daerah	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Contoh	Komisi Yudisial KASN, Setjen DPR, dsb.	Kementerian PANRB, Kementerian BUMN, Pemerintah Kab/Kota	Kementerian Pendidikan, BKN, Pemerintah provinsi

• Kriteria di atas merupakan dasar bagi K/L/D untuk menentukan model tim RB berdasarkan tipe KL masing-masing  
 • Setelah menentukan model yang sesuai, maka K/L dapat menggunakan model sebagai dasar untuk membentuk tim RB

<b>Tim RB</b>			
Kriteria	Model 1	Model 2	Model 3
Tim RB Pusat	Ya	Ya	Ya
Anggota Tim RB Pusat	Perwakilan dari seluruh unit kerja	Perwakilan unit kerja yang memiliki fungsi kesekretariatan di masing-masing unit kerja level 1	Perwakilan unit kerja yang memiliki fungsi kesekretariatan di masing-masing Eselon 1 dan/atau level di bawahnya sesuai kebutuhan
Tim RB Unit	Tidak	Ya	Ya
Anggota Tim RB Unit Level I	Tidak	Perwakilan dari Eselon 2	Perwakilan dari Eselon 2
Anggota Tim RB Unit Level II	Tidak	Tidak	Perwakilan dari Eselon 3

• Tim RB dapat sama/berbeda dengan TIM Z

Gambar 4.4. Model Tim Pengelola RB

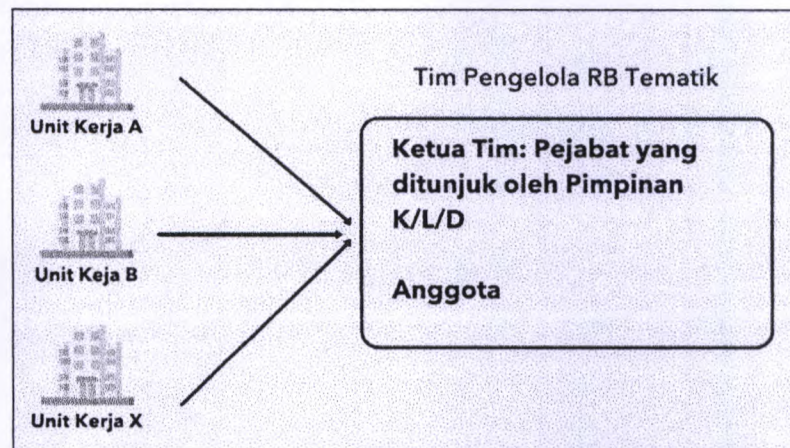
Sumber : Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro

#### 4.1.3.2. Tim Pengelola RB Tematik

Tim Pengelola RB Tematik terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Ketua Tim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan K/L/D
2. Bersifat adhoc, berbentuk squad team (kelompok atau satuan tim)
3. Terdiri dari unit kerja yg memiliki fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Tema RB Tematik

Contoh: Misalkan Tim RB Tematik terdiri dari Unit Kerja A, Unit Kerja B dan Unit Kerja X, maka Ketua Tim berasal dari Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan K/L/D, sedangkan yang lainnya menjadi anggota. Ilustrasi tersebut terdapat pada gambar berikut:



Gambar 4.5. Tim Pengelola RB Tematik

Sumber : Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro

#### 4.1.4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar

Ketika RB Mikro dilaksanakan, baik RB Tematik maupun RB Generik dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga pelaksanaannya harus dikoordinasikan secara menyeluruh antara RB General dan RB Tematik.

Kesuksesan pelaksanaan RB Tematik bergantung pada faktor-faktor berikut:

1. Komitmen

Yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh anggota.

2. Menyelesaikan akar masalah

Bukan fokus hanya pada masalah, tapi akar masalah.

3. Kolaborasi

Melibatkan berbagai unit kerja dari sector yang beraneka ragam baik di tingkat pusat K/L/D, maupun stakeholders.

4. Inovatif

Aksi atau kegiatan yang dilakukan bersifat *out of the box*, bukan *business as usual*.

#### 4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

##### 4.2.1. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi terbagi menjadi dua level, yakni di tingkat nasional (RB Nasional) dan di tingkat instansi (RB Instansional). Monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian

hasil pelaksanaan RB baik output (keluaran) maupun outcome (hasil). Monitoring dan evaluasi di tingkat nasional dilakukan oleh UPRBN, di tingkat instansi dilakukan oleh leading institution dan UPRBN.

#### 4.2.2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara semesteran melalui forum monev antar leading institutions dengan melibatkan UPRBN, TRBN, TIRBN, TPKRBN, dan KPRBN. Sedangkan, evaluasi dilakukan secara tahunan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh UPRBN dengan mengkompilasi laporan hasil evaluasi dari leading institutions yang disampaikan kepada KPRBN dan TRBN dengan tembusan kepada TIRBN dan TPKRBN. Pengaturan mengenai evaluasi secara khusus akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB baru pengganti Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB.

#### 4.2.3 Monitoring dan Evaluasi Internal RB General

Monitoring dan Evaluasi dilakukan berdasarkan Rencana Aksi RB General. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan secara berkala pada tiap triwulanan dan tahunan oleh seluruh K/L/D oleh Evaluator Internal. Monitoring dan Evaluasi Internal RB General mencakup 3 komponen yaitu:

1. Apa : Berdasarkan Renaksi RB General
2. Frekuensi : Triwulanan dan Tahunan
3. Siapa : Evaluator Internal

#### 4.2.4. Monitoring dan Evaluasi serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) RB Tematik

Monitoring dan Evaluasi RATL didasarkan pada Dokumen Rencana Aksi RB Tematik. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan (tiga bulan) dan setiap tahun. Evaluator Internal mengawasi dan menilai. Selama pelaksanaan, RB General dan Tematik dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga Monev RB Mikro harus komprehensif dikoordinasikan antara General dan Tematik (bukan silo). Monitoring dan Evaluasi Internal RB Tematik mencakup 3 komponen yaitu:

1. Apa : Berdasarkan Renaksi RB Tematik
2. Frekuensi : Triwulanan dan Tahunan
3. Siapa : Evaluator Internal

Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah akan mengatur hal ini lebih lanjut.

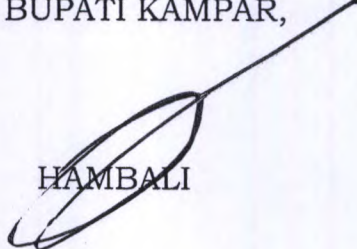
BAB V  
PENUTUP

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi, yang melibatkan pembaharuan dan perubahan besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi jelas merupakan tugas yang menantang. Semua pihak harus terlibat dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pemimpin harus menjadi contoh perubahan dan perubahan. Agar reformasi birokrasi berhasil, reformasi harus dilakukan secara konsisten dan konsisten.





Pada akhirnya, Roadmap RB dimaksudkan untuk membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan berdaya saing yang dapat mendorong pembangunan nasional, daya saing global, dan peningkatan pelayanan publik. Praktik RB yang efektif akan menjadi dasar untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kampar yang cepat, cepat, tanggap, tepat, profesional, dan bebas dari kecurangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu kami menyusun pekerjaan ini. Kami sadar bahwa pekerjaan ini masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membantu kami memperbaiki hal-hal di masa mendatang.

Pj. BUPATI KAMPAR,



HAMBALI

Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Organisasi	
JF. Perancang Peraturan Perundang-undangan	
JF. Analis Sumber Daya Manusia	

## BAB V

### PENUTUP

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi, yang melibatkan pembaharuan dan perubahan besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi jelas merupakan tugas yang menantang. Semua pihak harus terlibat dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pemimpin harus menjadi contoh perubahan dan perubahan. Agar reformasi birokrasi berhasil, reformasi harus dilakukan secara konsisten dan konsisten.

Pada akhirnya, Roadmap RB dimaksudkan untuk membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan berdaya saing yang dapat mendorong pembangunan nasional, daya saing global, dan peningkatan pelayanan publik. Praktik RB yang efektif akan menjadi dasar untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kampar yang cepat, cepat, tanggap, tepat, profesional, dan bebas dari kecurangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu kami menyusun pekerjaan ini. Kami sadar bahwa pekerjaan ini masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membantu kami memperbaiki hal-hal di masa mendatang.

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI